

**PERAN PANWASLU DALAM KONFLIK PILWALI DI KOTA
MAKASSAR TAHUN 2018**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik
Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik
UIN Alauddin Makassar**

Oleh :

A MUH SETIAWAN PUTRA

NIM: 30600113022

**FAKULTAS USHULUDDIN FILSAFAT DAN POLITIK
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2019**

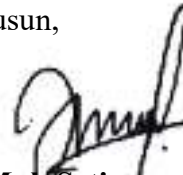
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. Muh Setiawan Putra
Nim : 30600113022
Tempat/Tgl Lahir : Ujung Pandang, 31 juli 1995
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ushuluddin, Filsafat, dan Politik
Alamat : JL. Minasaupa Raya IX B.6 No 7
Judul Skripsi : Peran Panwaslu Dalam Konflik Pilwali Di Kota Makassar
Tahun 2018

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Januari 2019
Penyusun,



A Muh Setiawan Putra
NIM. 30600113022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi saudara **A MUH SETIAWAN PUTRA, NIM: 30600113022**, Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama mengoreksi Skripsi yang bersangkutan dengan judul "PERAN PANWASLU DALAM KONFLIK PILWALI DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2018". Memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan disetujui untuk Ujian Tutup Munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan dan diproses selanjutnya.

Samata, 22 januari 2019

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.si
NIP. 19600505 198703 1 004

PEMBIMBING II



Febrivanto Syam, S. IP, M.IP
NIDN. 2011028901

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGUJI I



Syahrir karim, M.Si, Ph.D
NIP. 19780410 200901 1 013

PENGUJI II



DR. Dewi Anggariani, M.Si
NIP. 19690729 199903 2 001

KETUA JURUSAN



Syahril Karim, M.Si, Ph.D
NIP. 19780410 200901 1 013

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Peran Panwaslu Dalam Konflik Pilwali di Kota Makassar Tahun 2018" yang disusun oleh A. Muh. Setiawan Putra, NIM: 30600113022, mahasiswa Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 M, bertepatan dengan 29 Jumadil Awal 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 4 Februari 2019 M.
29 Jumadil Awal 1440 H.

DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Dr. Tasmin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	:	Ismah Tita Ruslin, S.IP., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	:	Syahrir Karim, M.Si., Ph.D.	(.....)
Munaqisy II	:	Dr. Dewi Anggariani, M. Si.	(.....)
Pembimbing I	:	Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M. Si.	(.....)
Pembimbing II	:	Febrianto Syam, S. IP, M. IP	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.
NIP. 19590704 1989031 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah swt, pemilik segala sesuatu yang kepadanya kita sebagai hambanya akan menghadapi amal yang dilakukan selama berada didunia fana ini. Kasih dan sayang Allah swt untuk manusia sebagai makhluk yang paling istimewa diantara semua makhluk yang diciptakan semata-mata untuk menyembah dan bersujud kepadanya. Allah swt pula yang telah memberikan berbagai nikmat dan karunia sehingga kita dapat menjalani hidup seperti sekarang ini, maha suci Allah swt atas segala rahmatnya. Salam serta salawat tak lupa kita kirimkan kepada nabi Muhammad saw yang karena perjuangan dan pengorbanan beliau sehingga kita dapat merasakan zaman yang penuh dengan moral dan etika, beliau juga sebagai pahlawan yang revolusioner ditengah krisis kepemimpinan dimasa suram umat manusia pada zamannya. Semoga Allah swt meridhoinya dan merahmati segala perjuangan dan pengorbanan beliau untuk agama dan era yang cerah bagi umat manusia. Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini adalah berkat dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah membantu penulis selama ini, mereka adalah:

1. Teristimewa kepada Ayahanda A. Munassar dan Ibunda A. Firdania tercinta yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya, perhatian dan motivasi dukungan serta doa yang tulus dalam keberhasilan penulisan sampai sekarang ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. H. Natsir, M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Bapak Syahrir Karim, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Sekaligus Penguji dalam ujian klarifikasi hasil yang telah banyak memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun.
5. Ismah Tita Ruslin, S.ip, M Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
6. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.si selaku pembimbing I dan bapak Febriyanto, S.IP, M.IP selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan segala dorongan, motivasi, pengetahuan, dan bimbingannya dalam penyelesaian penulisan tugas akhir ini. Hanya doa yang dapat penulis persembahkan agar senantiasa mendapatkan curahan Rahmat dunia dan akhirat.
7. Dr. Dewi Anggariani, M.Si, selaku sekretaris jurusan sosiologi agama fakultas Ushuluddin, Filsafat dan politik sekaligus sebagai Penguji dalam ujian klarifikasi hasil yang telah banyak memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun.
8. Segenap dosen, pegawai dan seluruh staf Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang

telah mencurahkan ilmunya tanpa pamrih serta motivasi, nasihat, dan pelayanannya selama penulis dalam perkuliahan.

9. Bapak dan Ibu pegawai Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah memberikan fasilitas dan membantu menyediakan referensi selama masa perkuliahan dan pembuatan skripsi.
10. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi selama kuliah bahkan sampai penyelesaian skripsi ini dan semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang memberikan semangat kepada penulis.
11. Kepada saudara seperjuangan terutama kelas 1 dan 2 Ilmu Politik 2013 yang selalu ada selama kurang lebih lima tahun. Dan saudara seperjuangan Ilham S.Sos , Ardi Aminuddin S.Sos, Paisal S.Sos, Muh Asharuddin, Irshan Zulfikar Malluluang S.Sos, senior dan junior yang telah memberikan semangat, kebersamaan dan bantuannya kepada penulis selama menumpuh perkuliahan bahkan penyelesaian skripsi ini.
12. Seluruh informan, narasumber dan semua pihak terkhusus PANWASLU Kota Makassar yang ikut serta membantu dalam proses penelitian dan pengumpulan data yang senantiasa membantu dalam pengambilan data ditempat penelitian, terima kasih atas bantuannya selama ini.
13. Kepada segenap pengurus Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang gowa raya, yang telah mengajarkan bagaimana kita mengembangkan potensi yang ada dan mengajarkan tentang bagaimana hidup berorganisasi.

14. Teman-teman KKN angkatan 53 di kecamatan Pallangga desa Taeng UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelajaran tentang bagaimana kita menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapat pada masyarakat umum dan mengesampingkan ego dalam hangatnya kebersamaan.

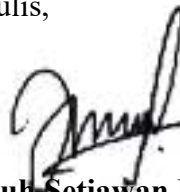
15. Kepada seluruh teman-teman selama penulis menempuh pendidikan dari Sekolah Dasar sampai SMA Muchlis Mursida SH, Nur alim, Chaidir Fadli, Muh Naisrun Aprianto, Saleh Rahmat, Muh taufik hidayat, M Yusran Anugrah P yang telah menjadi teman berbagi cerita, candaan sekaligus memberikan dukungan selama ini.

Serta kepada semua insan yang tercipta dan pernah bersentuhan dengan jalan hidup penulis. Kata maaf serta ucapan terima kasih yang tidak terkira atas semuanya. Sekecil apapun perkenalan itu, bagi penulis sungguh suatu hal yang amat sangat luar biasa diatas segalanya, Allah SWT yang telah menganugerahkan mereka dalam kehidupan saya.

Terakhir, besar harapan penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap pembaca, karena salah satu amalan yang baik di mata Allah SWT adalah ilmu yang bermanfaat.

Samata-Gowa, 4 Februari 2019

Penulis,



A Muh Setiawan Putra
Nim : 30600113022

DAFTAR ISI

JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SKRIPSI.....	
KEASLIAN SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian pustaka.....	9
BAB II LANDASAN TEORI& KONSEPTUAL	17
A. Tinjauan Teoritis	17
1. Teori Peranan	17
2. Teori Konflik	19
BAB III METODE PENELITIAN	29
1. Lokasi Penelitian.....	29
2. Jenis Penelitian.....	29
3. Subjek/Objek Penelitian.....	29
4. Teknik Pengumpulan Data.....	30
5. Teknik Analisis Data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Kota Makassar.....	34
B. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).....	36
1. Visi Bawaslu	38
2. Misi Bawaslu	41
3. Profil Panitia Pengawas pemilu (Panwaslu) Kota Makassar	45
C. Peran Panwaslu Dalam konflik pemilukada Di Kota Makassar	47
D. Faktor Yang Menjadi Kendala Panwaslu Dalam Pilkada.....	56
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama : A. Muh Setiawan Putra

NIM : 30600113022

Judul : Peran Panwaslu Dalam Konflik Pilwali Di Kota Makassar Tahun 2018

Penelitian ini tentang peran Panwaslu dalam konflik Pilwali di kota Makassar tahun 2018. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis fungsi pengawas pemilu dalam menjalankan peran sebagai pengawas pemilu yang independen yang mengawasi serta menindak jika terjadi konflik, sengketa kecurangan-kecurangan pada proses pemilihan umum kepala daerah yang berlangsung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan peristiwa atau kejadian, perilaku orang atau keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam.

Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori (1) teori peranan (*role*) (2) teori konflik. teori – teori diatas digunakan untuk mencari dan menganalisis jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi. Metode pengumpulan data primer di dalam skripsi ini menggunakan metode wawancara dan metode observasi, sedangkan data sekunder menggunakan metode dokumenter dan metode kajian pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah diskriptif analisis dari hasil wawancara, peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis berdasarkan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini..

Hasil penelitian ini menunjukkan peran panwaslu belum cukup efektif ancaman terhadap kualitas pemilu di kota Makasar yang disebabkan konflik berkepanjangan bukan halnya konflik fisik semata namun konflik sejatinya adalah benturan perbedaan pendapat yang dimana konflik bisa berbentuk soft clash dan hard clash. Rentang waktunya pun akan panjang tidak hanya dalam tahapan kampanye, namun bisa sampai kehari H pemilihan. Faktor – faktor Yang Menjadi Kendala Panwaslu Dalam Pemilukada Di Kota Makassar 1. faktor struktur, meliputi, Panwas dibentuk pada saat tahapan pemilu berlangsung karena panwas bersifat ad hoc, Jumlah personil yg masih kurang, sarana penunjang, tidak sebanding tugas dan wewenang dengan dana operasional 2.faktor substansi berupa regulasi/aturan yang dibuat oleh pemerintah yang memiliki banyak celah sehingga dapat memungkinkan seseorang melakukan pelanggaran pemilu 3.faktor culture budaya,dalam perkembangan budaya politik bisa timbul karena adanya sifat kekerabatan antara pemerintah dengan calon kepala daerah, sehingga dalam penyelenggaraan pemilu masyarakat memilih bukan berdasarkan hati nurani yang sesuai dengan kapasitas dan elektabilitas dari calon kepala daerah tapi berdasarkan asas kedaerahan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem demokrasi, ikut serta dalam pemilihan umum merupakan hak politik bagi setiap warga negara. Pemilu hakikatnya merupakan sistem penjurian pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi. Terkait dengan hal ini, maka partai-politik benar-benar diperhatikan agar terlihat aspiratif kepada masyarakat dan dapat meraih simpati mereka sebanyak-banyaknya pada pemungutan suara. Pada masa Pemilu inilah diselenggarakan masa kampanye sebagai alat untuk memperkenalkan visi, misi dan program-program yang akan direalisasikan para calon kandidat kepada masyarakat.

Pemilihan umum atau Pemilu merupakan manifestasi dari pelaksanaan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Praktek pemilihan umum dengan melibatkan masyarakat luas pertama kali dilaksanakan pada saat disahkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun petunjuk penetapan pelaksanaan tertuang dalam PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah.¹ Sedangkan aturan yang

¹H.Rozali Abdullah, Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif), (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.10

mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyempurnaan yang komprehensif dalam satu undang-undang terhadap semua penganturan penyelenggara Pemilu, meliputi DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Inilah undang-undang yang menyebut pertama kali Pilkada sebagai Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.²

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu pada prinsipnya sifat KPU diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003, yaitu bersifat nasional, tetap dan mandiri. Hanya saja dalam undang-undang baru ini, yaitu UU No.22 Tahun 2007 dinyatakan dengan kalimat berbeda, yaitu: “Wilayah kerja KPU meliputi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.”³

Pemilu yang diselenggarakan membutuhkan biaya yang sangat mahal, baik biaya sosial maupun dana yang berasal dari anggaran negara/daerah. Konflik yang terjadi setelah Pemilu dilaksanakan, karna ada pihak yang merasa tidak puas dengan hasil yang di peroleh. Apabila melihat realita demikian, maka Pemilu yang

²Suharizal, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, Dan Konsep Mendatang*, (Jakarta: rajawali pers, 2012), h.76.

³H.Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.19.

dilaksanakan di Indonesia banyak menimbulkan *mudarat* daripada manfaat yang diperoleh.

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan nilai Islam harus menjadi bagian dalam kehidupannya, termasuk didalamnya adalah bagaimna cara memilih pemimpin. Agama Islam (termasuk hukumnya) tidak memberikan batasan untuk memilih metode tertentu dalam menentukan wakil rakyat atau pemimpinnya. Hal ini dikarenakan dalam Islam mempunyai tujuan yang agung yaitu agar tidak ada kesulitan bagi kaum muslim, sebagaimana diatur dalam firman Allah Q.S. an-Nisa/4: 59, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan)) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁴

Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Walikota dan Wakil Walikota Makassar 12 Pebruari 2018, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) selaku penyelenggaran “Pesta Politik” itu hanya meloloskan dua pasangan calon.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Sukses Publishing, 2012), h. 87.

Masing-masing yakni Mohammad Ramadhan Pomanto (*incumbent* wali Kota Makassar) dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham serta Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi.

Pada pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU Makassar beberapa waktu lalu, Mohammad Ramadhan Pomanto dan Indira Mulyasari maju melalui jalur *independen*. Sementara pasangan Munafri Arifuddin dan Rachmatika Dewi melalui jalur partai politik dengan usungan 10 partai politik, yakni partai Golkar, PDI-P, Gerindra, Hanura, PKB, PPP, PBB, PKS, dan PKPI.⁵

Sejarah pengawasan pemilukada terdapat Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) sebagai badan pengawas pemilu tingkat nasional/provinsi yang tugasnya berkaitan dengan penegakan hukum Pemilu, namun pada prakteknya pekerjaan Bawaslu yang mengawasi tahapan-tahapan Pemilukada tak selamanya berjalan mulus dan terdapat Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) sebagai panitia pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota. Bawaslu memiliki peran sebagaimana yang diatur dalam UUD Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu.

Melaksanakan tugasnya Bawaslu (Panwaslu) bersama dengan KPU berperan penting dalam mengawal Pemilukada di Kota Makassar. Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu, yang meliputi anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas

⁵Erwin Hutapea, *Dua Paslon Pilkada Makassar Ditetapkan, tetapi Tidak Ada Kandidiat yang Hadir*, Kompas.com. 12 Februari 2018<http://regional.kompas.com/read/2018/02/12/201205>.

anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan.

Bawaslu berkedudukan di Jakarta, sebagai ibu kota negara. Anggota bawaslu terdiri dari kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam komposisi anggota bawaslu, harus memerhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Bawaslu terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan aaggota. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu sendiri yang masing-masing anggota memiliki hak yang sama.⁶

Di Indonesia sendiri Bawaslu mulai muncul pada tahun 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu), atas dasar banyaknya protes-protes terkait pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada pemilu 1971, karena palanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif.

Pemilukada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 di Kota Makassar terkhusus Pilwalkot, tidak semulus harapan banyak kalangan, yang terjadi justru menimbulkan kecemasan banyak pihak. Hal ini dipicu oleh munculnya berbagai konflik dengan tingkat eskalasi yang cukup besar yang mewarnai perjalanan pemilihan kepala daerah secara langsung yang dilaksanakan di beberapa daerah. Banyak temuan/laporan kecurangan pelanggaran pemilu seperti pelanggaran kampanye, pemasangan baliho/poster tidak sesuai tempat dan waktunya, pelanggaran administratif, politik uang, ketidaknetralitasan ASN,

⁶ H.Rozali Abdullah, Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif), (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.99.

pertikaian antar pendukung, perusakan fasilitas publik hingga perusakan gedung-gedung milik pemerintah. Menurut Panwaslu Kota Makassar, setidaknya telah terjadi 26 laporan pelanggaran pemilu di Kota Makassar dari September 2017 hingga bulan Mei 2018.⁷

Adapun tugas dan wewenang Bawaslu adalah mengawasi dan menegakkan pelaksanaan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, serta kode etik.⁸ Adapun peran Bawaslu yaitu mengkoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilihan, menerima dan menindak lanjuti laporan atas tindakan penyelenggaraan pemilihan, menindak lanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu provinsi maupun panwas kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan pemilihan, dan lain-lain.⁹

Pelaksanaannya, pemilihan kepala daerah secara langsung tidak semulus harapan banyak kalangan, yang terjadi justru menimbulkan kecemasan banyak pihak. Khususnya di Kota Makassar hal ini dipicu oleh munculnya berbagai konflik dengan tingkat eskalasi yang cukup besar yang mewarnai perjalanan pemilihan kepala daerah secara langsung yang dilaksanakan di beberapa daerah. Mulai dari pertikaian antar pendukung, perusakan fasilitas publik hingga perusakan gedung-gedung milik pemerintah.

KPU seharusnya harus bertindak atau berlaku netral dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu. Sebagaimana yang jelaskan dalam

⁷Sumber Data Panwaslu Kota Makassar Tanggal 14 Agustus 2018

⁸Undang-Undang tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2011, Bab 12, Pasal 9.

⁹Amandemen Undang – Undang Pilkada (UU No.10 Tahun 2016), Pasal 22, h.9-10.

firman Allah Q.S. an-Nisa/4: 58 tentang pentingnya berlaku adil dalam menetapkan hukum sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾



Terjemahnya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.*¹⁰

Selain itu, rendahnya integritas peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu. Dua hal tersebut turut andil menurunkan derajat integritas Pemilu. Hal ini terlihat bagaimana proses kontestasi yang dibangun tidak didasari oleh prinsip-prinsip Pemilu yang jujur, demokratis, dan adil. Persoalan-persoalan diatas, tidak mungkin terjadi apabila potensi konflik dalam pemilihan kepala daerah secara langsung bisa dideteksi sejak awal. Sehingga pemerintah dan penyelenggara Pemilu bisa mempersiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi terjadinya konflik.

Bangsa Indonesia pada umumnya khususnya di Kota Makassar, betul-betul mendambakan terwujudnya suatu Pemilu yang lebih berkualitas, yaitu suatu pemilu yang berlangsung secara demokratis, dan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin Negara atau pemimpin daerah, yang mampu mewujudkan

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Sukses Publishing, 2012), h. 87.

kesejahteraan bagi masyarakat, disamping dapat pula mengangkat harkat dan martabat bangsa dimata Internasional.

Dari penjelasan tersebut, hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana peran bawaslu dalam konflik Pilkada di Kota Makassar agar terciptanya pemilihan yang damai, adil dan sejahtera.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Peran Panwaslu dalam Konflik Pilwali di Kota Makassar Tahun 2018.

2. Deskripsi Fokus

Agar terhindar dari kesalahpahaman tentang judul dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan deskripsi fokus sebagai berikut:

Panwas mempunyai peranan yang penting dalam rangka mengawal pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya peranan Panwas karena semua pengaduan haruslah melewati satu pintu yaitu Panwas agar dapat terhindar dari konflik.

Faktor yang paling sering menimbulkan pertentangan dalam kehidupan sosial adalah manusia yang selalu egois, tidak memiliki rasa senang dan selalu mementingkan kepentingan pribadi atau golongan.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini terbagi atas dua, yaitu pokok masalahnya adalah bagaimana peran Panwaslu dalam konflik Pilkada di kota Makassar. Berdasarkan pokok masalah tersebut, dirumuskan sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Panwaslu dalam konflik Pilkada di Kota Makassar 2018?
2. Faktor yang menjadi kendala Panwaslu dalam Pilkada di Kota Makassar?

D. Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Panwaslu dalam pilukada di Kota Makassar 2018.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala Panwaslu di Pilukada di kota Makassar.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran informasi, dan menjadi bahan referensi dalam ilmu politik tentang upaya panwaslu dalam konflik pilkada di kota Makassar khususnya bagi para peneliti lain yang melakukan penelitian sejenisnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini sebagai motivasi untuk mahasiswa maupun masyarakat umumnya dan kalangan elit agar tau benar tentang peran apa saja yang harus ditegakkan oleh panwaslu dalam konflik pilkada di kota Makassar.

F. Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh penulis mengenai judul ini maka ada beberapa penelitian sebelumnya terkait judul yang diangkat penulis.

1. Skripsi dengan judul, “*Peran Bawaslu Propinsi Lampung dalam Menegakkan Peraturan KPU*” oleh Novita meilanti, dalam penelitian skripsi ini pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pemilihan langsung pemerintah dalam hal ini diwakili oleh komisi pemilihan umum mengharuskan setiap hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam masyarakat dapat memberikan hak suaranya dalam proses pemilihan langsung dan diawasi oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Dalam menegakkan peraturan KPU masih kurang optimal, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor pertama, lemahnya kapasitas Sumber Daya Manusia ditingkat Kabupaten/Kota dan jajaran Pengawasan Pemilu dibawahnya dalam memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya. Kondisi ini terjadi karena sifat kelembagaan Panwaslu Kabupaten/Kota yang *adhock*, pola rekrutmen Pengawasan Pemilu yang *adhock*, masih kurang baik serta rendahnya alokasi anggaran pengawasan di daerah. Kedua, masih ada sejumlah ketentuan yang membatasi Bawaslu dalam memaksimalkan perannya.¹¹

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu masyarakat dapat memberikan hak suaranya dalam proses pemilihan langsung dan diawasi oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian

¹¹Novita meilanti, *Peran Bawaslu Propinsi Lampung dalam Menegakkan Peraturan KPU*, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Raden Intan Lampung, 2017), h. ii

penulis adalah penelitian ini terfokus mengkaji peran bawaslu provinsi lampung dalam menggakkkan peraturan KPU sedangkan penelitian yang dilakukan penulis tidak terfokus kepada meneggakkan peraturan KPU namun fokus kepada upaya panwaslu dalam konflik Pilkada.

2. Jurnal dengan judul “*Potensi Konflik Pada Pemilihan Kepala Daerah Lansung Di Kota Makassar Tahun 2013*” oleh Andi Ali Munarto.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk potensi konflik yang terjadi dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik Pemilukada di kota Makassar. Penulis melakukan penelitian deskriptif dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta diskusi kelompok tertatah (FGD) dengan beberapa individu dan kelompok yaitu elit politik yang akan ikut pada Pemilukada kota Makassar dan tim suksesnya, partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi, Media massa serta masyarakat umum. Data dari hasil wawancara dan FGD dicatat secermat mungkin dan dikumpulkan. Semua data dianalisis secara kualitatif sehingga apa yang terkandung dibalik realitas dapat terungkap. Berkaitan dengan potensi konflik Pemilukada Kota Makassar tahun 2013, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait faktor pemicu terjadinya konflik Pemilukada di Kota Makassar. Dalam hal ini potensi konflik dibagi ke dalam dua faktor yaitu faktor sosiologis, dan faktor institusional.¹²

¹²Andi Ali Munarto, *Potensi Konflik Pada Pemilihan Kepala Daerah Lansung Di Kota Makassar Tahun 2013*, (Jurnal Magister Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Vol 1, No. 1, Januari 2015), h. 24.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni mengetahui bentuk potensi konflik yang terjadi dan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik Pemilu di kota Makassar. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objek penelitian terfokus kepadaawas (Badan pengawas Pemilu).

3. Jurnal dengan judul *“Peranan Panwaslu Propinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 (studi kasus di propinsi Kalimantan barat)”* oleh IndrawatiMaksud dari pengambilan judul skripsi ini adalah Dimana selama ini dalam pilkada yang diketahui hanya peranan KPU, namun ternyata jika mengenai kesalahan atau adanya pelanggaran yang dilakukan dalam proses Pemilu ada suatu lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani masalah dalam pilkada baik seperti halnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana Pemilu. Adapun tujuan penelitian untuk mencari dari ada tidaknya pelanggaran baik administrasi maupun pelanggaran yang lainnya seperti pelanggaran pidana, dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2012 diKalimantan Barat.¹³

¹³Indrawati, Peranan Panwaslu Propinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 (Studi Kasus Di Propinsi Kalimantan Barat), (Jurnal Hukum Mahasiswa S1, Prodi Ilmu Hukum Untan, Vol. 2, No. 1, 2013), hal. 1

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengetahui tugas Panwaslu sebagai pengawas pemilu, dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana Pemilu. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis terfokus kepada konflik pilkada yang terjadi di kota Makassar

4. Jurnal dengan judul “*Mengapa Integritas Penting?*” oleh Mudiya Rahmatunnisa Pemilihan umum (Pemilu) telah menjadi fenomena kontemporer yang mengglobal, baik di negara yang telah maju dan matang demokrasinya, maupun negara berkembang yang masih dalam proses transisi menuju demokrasi. Namun demikian, pengalaman berbagai negara tersebut menunjukkan bahwa Pemilu masih diwarnai oleh berbagai pelanggaran dan kecurangan (*electoral malpractices*). Dalam konteks inilah, konsep integritas Pemilu menjadi perhatian banyak ahli dan pengamat. Artikel ini mendiskusikan beragam pemaknaan, posisi strategis dan beragam faktor yang dapat mempengaruhi integritas Pemilu. Terlepas dari pemaknaannya yang beragam, artikel ini menunjukkan bahwa integritas Pemilu merupakan kualitas yang harus dimiliki untuk sebuah negara demokrasi. Pemilu yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan akan mengancam legitimasi rezim terpilih dan meruntuhkan kepercayaan warga terhadap institusi demokrasi. Proses transisi dan konsolidasi demokrasi sangat bergantung pada kualitas Pemilu yang

dilaksanakan. Artikel ini juga menguraikan beragam faktor dan strategi yang dapat diadopsi untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas. Dalam menjawab pertanyaan yang diajukan, Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur berbagai sumber yang relevan dan kontemporer. Dialektika dibangun dengan cara melakukan review dan menganalisisnya secara kritis atas berbagai sumber literatur yang terpilih.¹⁴

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam konteks pentingnya Pemilu di negara demokrasi yang mengglobal. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penulis tidak hanya membahas tentang pentingnya integritas Pemilu namun ingin mengetahui bagaimana peran panwaslu dalam konflik yang terjadi di kota makassar

5. Skripsi dengan judul “ *Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013*” oleh Alfin Prasetya Pada awalnya Penyelesaian sengketa hasil Pemilukada diselesaikan dalam persidangan yang masuk dalam ranah Kompetensi Absolut Mahkamah Agung. Namun, sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu, Pilkada yang semula masuk ke dalam ranah Pemerintahan Daerah bergeser menjadi ranah Pemilihan Umum. Selanjutnya disebut dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disingkat Pemilukada. Adapun metode penelitian

¹⁴Mudiyati Rahmatunnisa, *Mengapa Integritas Pemilu Penting?*, (Jurnal Bawaslu, ISSN 2443,2539, Vol. 3, No. 1, 2017), h. 2

yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum kepustakaan (*Library Research*), dengan menggunakan pendekatan yuridis normative dengan sifat penelitian yakni deduktif yakni menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh, terkait dengan penyelesaian sengketa Pemilu/pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Setelah melakukan penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya Lembaga yang dianggap paling tepat menangani sengketa Pilkada adalah Mahkamah Agung dengan mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi di tiap tiap daerah. Jika pihak yang berperkara tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi maka, dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Sementara UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, masih menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi (meski sifatnya sementara) untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Untuk itu, perlu segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Sedangkan kesesuaian antara putusan MK tersebut dengan prinsip Negara Hukum yakni telah sesuai, dilihat dari bagaimana MK memberikan kepastian hukum terhadap proses penyelesaian sengketa tersebut, yakni dalam putusan MK tersebut dicantumkan bahwasannya MK tetap berwenang menangani.¹⁵

¹⁵Alfin Prasetya, *Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu/pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013*, (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), h. ii

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam konteks sengketa Pilkada, apabila terjadi maka akan berujung pada konflik Pilkada. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu objek penelitian merujuk kepada Bawaslu (badan pengawas pemilu).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Teoritis

1. Teori Peranan

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat di pisahkan – pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya, takada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal berikut.

- a. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya,

- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu- individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya.mereka harus terlebih dahulu dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakannya peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaanya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Di Indonesia terdapat kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan ketimbang peranan. Gejala tersebut terutama disebabkan adanya kecenderungan kuat untuk lebih mementingkan nilai materialisme dibanding spritualisme. Nilai materialisme didalam kebanyakan hal diukur dengan adanya atribut-atribut atau ciri-ciri tertentu yang bersifat lahiriah dan di dalam kebanyakan hal bersifat konsumtif. Memang perlu diakui bahwa di Indonesia peranan juga mendapatkan penghargaan tertentu, tetapi belum proporsional sifatnya, padahal menjalankan peranan berarti melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Apabila seorang pegawai negeri, misalnya , lebih mementingkan kedudukan dibanding peranannya, dia akan menuntut warga masyarakat untuk lebih melayaninya (padahal peranan seorang pegawai negeri memberikan pelayanan

kepada warga masyarakat). Faktor inilah yang antara lain mengakibatkan terjadinya halangan-halangan didalam menerapkan birokrasi yang positif.¹⁶

Islam juga dijelaskan bahwa seseorang yang di beri tanggung jawab harus menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Sesuai dengan hadist berikut ini:

حَدَّثَنِي اِبْرَاهِيْمُ عَنْ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي
زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ،
حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ،
عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
«إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ، يُقَاتِلُ مِنْ
وَرَائِهِ، وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ
بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ، كَانَ
لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ، وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ
كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ.»¹⁷

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim dari muslim telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Syababah telah menceritakan kepadaku Warqa' dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi shalallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:“Seorang imam itu ibarat perisai, seseorang berperang dibelakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya. Jika seseorang

¹⁶Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), h.212-216

¹⁷Muslim bin Al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qasyairi an-Nasaiburi, *al-Musnadu, al-Sahih al-Mukhtasr Binaqli al-'Adal ila Rasulillah Sallahu 'Alihi Wasallam*, Jus V (Dar Ihyal at-Thiras al-'arbi: Bairut, 261H), h. 1471.

imam (Pemimpin) memerintahkan supaya taqwa kepada Allah ‘azza wajalla dan berlaku adil, maka dia (imam) akan mendapatkan pahala karenanya, dan jika dia (imam) memerintahkan selain itu, maka ia akan mendapatkan siksa.

2. Teori Konflik

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula.

a. Hakikat Konflik

Keberadaan konflik dalam suatu organisasi tidak dapat dihindarkan, dengan kata lain bahwa konflik selalu hadir dan tidak dapat dielakkan. Konflik sering muncul dan terjadi pada setiap organisasi, dan terdapat perbedaan pandangan pada pakar dalam mengartikan konflik. Mitchell, B , Setiawan, B., dan Rahmi, D. H. (2001) menjelaskan bahwa konflik atau pertentangan pada kondisi tertentu mampu mengidentifikasi sebuah proses pengolahan lingkungan dan sumber daya yang tidak berjalan secara efektif, mempertajam gagasan, bahkan dapat menjelaskan kesalahpahaman. Pertentangan kepentingan diantara anggota organisasi atau dalam komunitas masyarakat merupakan suatu kewajaran. Dalam kehidupan yang dinamis antar individu dan antar komunitas, baik dalam organisasi maupun di masyarakat yang majemuk, konflik selalu terjadi manakalah saling berbenturan kepentingan. konflik didefinisikan sebagai suatu proses interaksi sosial dimana dua orang atau lebih, atau dua kelompok atau lebih, berbeda atau bertentangan dalam pendapat atau tujuan mereka. Dengan kata lain konflik

timbul karena satu pihak mencoba untuk merintangi/mengganggu pihak lain dalam usahanya mencapai suatu tujuan.

Suatu organisasi yang sedang mengalami konflik dalam aktifitasnya menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut ;

1. Terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan antar individu atau kelompok
2. Terdapat perselisihan dalam mencapai tujuan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menafsirkan program organisasi
3. Terdapat pertentangan norma, dan nilai-nilai individu maupun kelompok
4. Adanya sikap dan perilaku saling meniadakan, menghalangi pihak lain untuk memperoleh kemenangan dalam memperebutkan sumber daya organisasi yang terbatas.
5. Adanya perdebatan dan pertentangan sebagai akibat munculnya kreatifitas, inisiatif dan gagasan-gagasan baru dalam mencapai tujuan organisasi.

b. Proses Terjadinya Konflik

Konflik tidak terjadi secara mendadak tanpa sebab dan proses, akan tetapi melalui proses-proses tahapan tertentu. Hendricks, W. (1992) mengidentifikasi proses-proses terjadinya konflik terdiri dari tiga tahap: pertama; peristiwa sehari-hari, kedua; adanya tantangan, sedangkan yang ketiga; timbulnya pertentangan.

Pada saat permulaan muncul suatu krisis di tandai adanya pertentangan untuk memperebutkan sumberdaya organisai yang terbatas, maupun disebabkan lingkungan kerja yang tidak kondusif. Selanjutnya muncul kesalahpahaman antar individu maupun kelompok dalam menafsirkan sasaran kelompok maupun tujuan organisasi secara keseluruhan.¹⁸ Konflik merupakan suatu kejadian yang didahului oleh suatu tahapan peristiwa dan antara satu fase dengan fase berikutnya saling berkaitan. Konflik digerakkan oleh perasaan frustrasi (kekecewaan) dari suatu kelompok karena aksi pihak lain, misalnya ; penolakan permintaan, pertentangan atau penghinaan, sehingga masing – masing kelompok menyadari adanya konflik dan memasuki tahap konseptualisasi (conceptualization), dan prosesnya terjadi secara subyektif.¹⁹

c. Penyebab Konflik

Setiap manusia mempunyai perbedaan dalam hal kecerdasan, kemampuan, sikap, bakat pengetahuan, kepribadian, cita – cita minat maupun kebutuhan. Perbedaan – perbedaan yang melekat pada diri individu dapat di manfaatkan sebagai sumber belajar, akan tetapi perbedaan dapat menimbulkan pertentangan diantara individu. Perbedaan individu harus diarahkan dan dikelola secara baik agar dapat mendorong perkembangan individu maupun kelompok.

Organisasi sebagai kumpulan individu tidak terlepas dari persoalan konflik dalam mencapai tujuan. Karena itu agar konflik dapat berdampak positif bagi

¹⁸Wahyudi, *Manajemen Konflik dalam Organisasi Pedoman Praktis Bagi Pemimpin* (Bandung : CV Alfabeta 2008). h. 16-18.

¹⁹Wahyudi, *Manajemen Konflik dalam Organisasi Pedoman Praktis Bagi Pemimpin* (Bandung : CV Alfabeta 2008). h. 23.

kelangsungan organisasi harus di kelola secara baik dengan mengetahui faktor – faktor yang menjadi penyebabnya. Konflik sering muncul karena kesalahan dalam mengkomunikasikan keinginan dan adanya kebutuhan dan nilai – nilai kepada orang lain.²⁰

Perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam oerorganisasi sering menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat, keyakinan dan ide-ide. Perubahan dan perkembangan organisasi dalam upaya menyesuaikan diri dengan lingkungan dan berusaha mengubah lingkungan sesuai dengan tujuan yang di tetapkan.²¹

Peristiwa konflik tidak hanya terjadi pada organisasi industri /perusahaan swasta, akan tetapi juga terdapat pada lembaga birokrasi (pemerintahan). Demikian halnya sumber-sumber konflik yang terjadi pada lembaga pemerintahan tidak berbeda dengan penyebab konflik yang terjadi pada organisasi non pemerintahan (swasta).²²

d. Resolusi Konflik

Resolusi atau penyelesaian konflik tidak bisa terpisahkan dari rekonsiliasi, karena rekonsiliasi merupakan salah satu tahap resolusi konflik yaitu proses *peace*

²⁰ Wahyudi, *Manajemen Konflik dalam Organisasi Pedoman Praktis Bagi Pemimpin* (Bandung : CV Alfabeta 2008). h. 34-35.

²¹ Wahyudi, *Manajemen Konflik dalam Organisasi Pedoman Praktis Bagi Pemimpin* (Bandung : CV Alfabeta 2008). h. 34-35.

²² Wahyudi, *Manajemen Konflik dalam Organisasi Pedoman Praktis Bagi Pemimpin* (Bandung : CV Alfabeta 2008). h. 44-45.

building, rekonsiliasi memiliki perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula, perbuatan menyelesaikan perbedaan.²³

Rekonsiliasi merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor. Resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika di kombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng. Pengolaan konflik berarti mengusahakan agar konflik berada pada level yang optimal. Jika konflik menjadi terlalu besar dan mengarah pada akibat yang buruk, maka konflik harus diselesaikan.

Menurut Ralf Dahrendrof penyelesaian konflik yang efektif sangat bergantung pada tiga faktor. Pertama, kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik diantara mereka. Kedua, kepentingan yang di perjuangkan harus terorganisir sehingga masing-masing pihak memahami tuntutan pihak lain ketiga, kedua pihak menyepakati aturan yang menjadi landasan dalam hubungan interaksi mereka.²⁴

²³ Andi Nurmadinah, *Resolusi Koflik Pasca Pilkada Tahun 2010 Di Kabupaten Gowa*, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012), h.15

²⁴ Andi Nurmadinah, *Resolusi Koflik Pasca Pilkada Tahun 2010 Di Kabupaten Gowa*, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012), h.16

Prof. Nasikun mengidentifikasikan melalui tiga cara mengenai pengendalian konflik, yaitu dengan rekonsiliasi (*reconciliation*) usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak yang berselisih, mediasi (*mediation*) penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah/penasehat, dan perwasitan (*arbitration*) penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang dipilih bersama dan punya kedudukan lebih tinggi. Strategi yang dipandang lebih efektif dalam pengolaan konflik meliputi :

1. Koesistensi damai, yaitu mengendalikan konflik dengan cara tidak saling mengganggu dan saling merugikan, dengan menetapkan peraturan yang mengacu pada perdamaian serta diterapkan secara ketat dan konsekuen.
2. Mediasi (perantaraan), jika penyelesaian konflik menemui jalan buntu, masing-masing pihak ketiga untuk menjadi perantara yang berperan secara jujur adil serta tidak memihak.

Pemecahan konflik dan menciptakan rekonsiliasi maka di butuhkan pertemuan tatp muka dari pihak-pihak yang berkonflik dengan maksud mengidentifikasi masalah dan memecahkannya lewat pembahasan yang terbuka. Syarat penting untuk mencapai rekonsiliasi menurut Robert F Bandle, adalah kesediaan masing-masing pihak untuk melakukan devaluasi, baik dalam nilai ideologis maupun nilai power.²⁵

Menurut Johan Galtung ada tiga tahap penyelesaian konflik yaitu :

²⁵ Robert F. Bandle, *The Origins Of Peace* (New York: The Free Press, 1973), h. 11-12

1. *Peacekeeping* adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral.
2. *Peacemaking* adalah proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan. Pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan guna mendapat penyelesaian dengan cara damai. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah, akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak untuk menentukan keputusan yang diambil. Pihak ketiga tersebut hanya menengahi apabila terjadi suasana yang memanas antara pihak bertikai yang sedang berunding.
3. *Peacebuilding* adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses *peacebuilding* diharapkan *negative peace* (atau *the absence of violence*) berubah menjadi *positive peace* dimana masyarakat merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif.

Resolusi konflik pada umumnya dipahami sebagai suatu kerangka teoritik dan praktik yang bertugas tidak saja untuk mengurangi dampak kerusakan yang terjadi akibat konflik, tetapi juga menyelesaikan dan mengakhiri konflik. Resolusi konflik berdasar pada kerangka teorik yang dibangun oleh John Burton. Salah satu teori dalam penyelesaian konflik adalah teori resolusi konflik (*conflict*

resolution), teori ini dikembangkan oleh Jon Burton. Jon Burton dalam tulisannya menyatakan:²⁶

“Resolusi konflik artinya menghentikan konflik dengan cara-cara analitis dan masuk ke akar permasalahan. Resolusi konflik berbeda dengan sekedar manajemen, mengacu pada hasil yang dalam pandangan pihak-pihak yang terlibat, merupakan solusi permanen terhadap suatu masalah”.

Jadi resolusi konflik suatu teori yang memberikan penekanan penyelesaian konflik pada akar permasalahan dari sebuah konflik dan kebutuhan melihat perdamaian dalam jangka panjang. Secara konseptual jika terjadi konflik dan aksi-aksi kekerasan yang massif maka resolusi konflik dapat dilakukan dengan empat tahap. Tahap pertama masih didominasi oleh strategi militer yang berupaya mengendalikan kekerasan bersenjata antara kelompok yang bertikai. Kedua, memiliki orientasi politik yang bertujuan untuk memulai proses re-integrasi elit politik dari kelompok yang bertikai. Tahapan ini biasanya dicirikan dengan dialog dan perundingan antar pihak-pihak yang bertikai. Ketiga, bernuansa sosial dan berupaya menerapkan *problem solving approach*. Terakhir, bernuansa *cultural* kental karena tahap ini bertujuan untuk melakukan perombakan-perombakan struktur sosial budaya yang dapat mengarah pada komunitas perdamaian yang langgeng.

Andi Wijayanto menjabarkan resolusi konflik menjadi empat alasan. Pertama, konflik tidak boleh saja dipandang sebagai suatu fenomena politik-

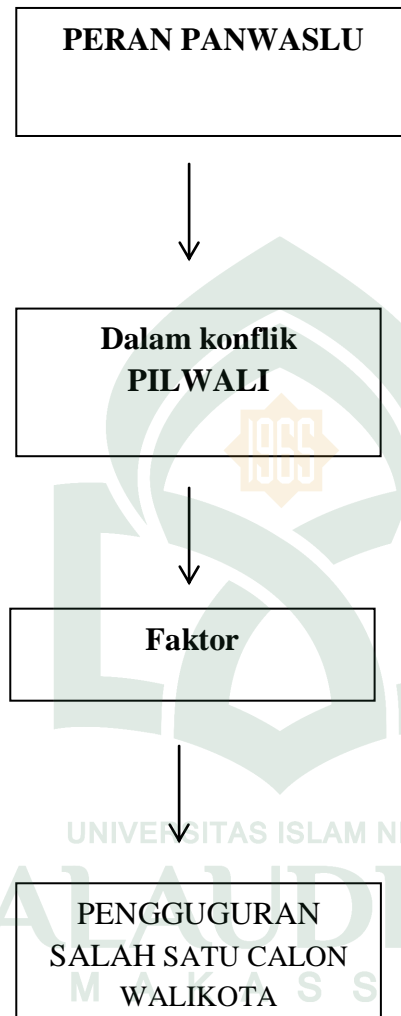
²⁶Yulius Hermawan, Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional: Actor, Isu, Dan Metodologi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007) h. 93

militer namun harus juga dilihat sebagai suatu fenomena sosial. Kedua, konflik memiliki suatu siklus yang tidak berjalan linear. Siklus hidup suatu konflik yang spesifik sangat tergantung dari dinamika lingkungan konflik. Ketiga, sebab-sebab konflik tidak dapat direduksi kedalam suatu variable tunggal. Suatu konflik sosial apalagi yang didasari motif-motif politik harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor. Keempat, resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng.²⁷



²⁷Yulius Hermawan, Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional: Actor, Isu, Dan Metodologi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007) h. 93

B. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah Kota Makassar untuk lokasi yang lebih spesifik dalam penelitian ini akan dilakukan di kantor Badan Pengawas Pemilu kota Makassar jalan Anggrek Kecamatan Panakkukang.

2. Jenis Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif disini adalah suatu bentuk penelitian yang mendeskripsikan peristiwa atau kejadian, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi atau pengembangan paragraf.²⁸

3. Subjek/Objek penelitian

- a) Untuk mengumpulkan data, telah ditentukan para informan yang akan memberi informasi mengenai masalah yang diteliti.
- b) Informan merupakan anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar. Informan yang akan penulis wawancarai adalah sebagai berikut:
 - 1) Ketua Panwaslu Kota Makassar
 - 2) Sekretaris Badan Pengawas Pemilu

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h. 10.

- 3) Staf Pegawai yang menangani persoalan konflik Pemilu kota Makassar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam dengan informan secara *face to face* untuk memperoleh pemahaman dan informasi yang lebih jelas dan akurat sesuai dengan data yang dibutuhkan. Dengan cara, penulis mendengarkan secara seksama serta mencatat hal-hal yang penting dan menggunakan alat perekam agar tidak terjadi kekeliruan dalam penulisan. Adapun teknik pengumpulan data tersebut sebagai berikut :

a) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara peneliti dan informan, dimana jawaban informan akan menjadi data mentah. Secara khusus, wawancara juga merupakan metode bagus untuk pengumpulan data tentang subjek kontemporer yang belum dikaji secara ekstensif dan tidak banyak literature yang membahasnya.²⁹

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan keterangan, dan informasi. Untuk itu maka model wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Model wawancara dimaksudkan disini adalah dimana peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya berbentuk pedoman wawancara.

²⁹Lisa harrisson. *Metode penelitian politik* (Jakarta: kencana, 2009), h. 104

b) Observasi

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Penelitian harus mendapatkan sendiri informasi atau data melalui pengamatan terhadap gejala-gejalanya secara sendiri, atau melalui pengamatan terhadap orang lain yang sudah dilatih peneliti terlebih dahulu untuk tujuan tersebut.³⁰

Penggunaan teknik observasi ini dimaksudkan untuk mengungkap fenomena yang tidak di peroleh melalui wawancara. Pada penelitian yang akan dilakukan di (bawaslu) badan pengawas Pemilu di Kota Makassar. Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, internet, skripsi, proposal. Metode ini digunakan sebagai metode utama untuk menggali data atau dokumen yang berkenaan dengan peran Panwaslu dalam konflik Pilkada di kota Makassar.³¹ Dokumentasi sebagai objek yang di perhatikan dalam memperoleh informasi, kita mempersatukan tiga macam sumber, yaitu tulisan (*paper*), tempat (*place*) dan orang (*people*). Dalam mengadakan penelitian yang bersumber pada tulisan inilah kita telah menggunakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki

³⁰Emzir, *Metode penelitian kualitatif: analisis data*. (Jakarta: rajawali pers, 2014), h.37-38.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1998), h. 149.

benda - benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, undang-undang , dan sebagainya.³²

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif, teknik analisis data kualitatif menurut Bogdan adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan tentunya di informasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.³³

Adapun tiga komponen pokok dalam analisis data, yakni:

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b) Penyajian Data

³²Robert K. Yin *Studi Kasus Desain Metode* (Jakarta : Rajawali Press, 1996), h. 103.

³³Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009),h.244.

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan table bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Dengan demikian, penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya sangatlah diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar/ kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.

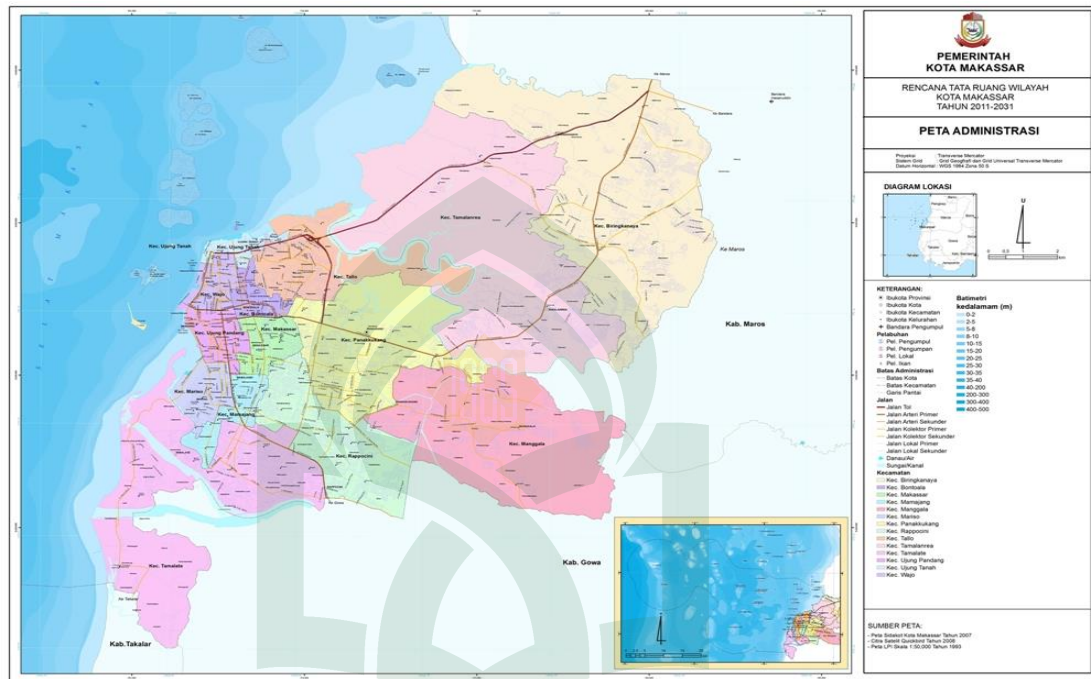
Ketiga komponen tersebut satu sama lain saling berkaitan erat dalam sebuah siklus. Peneliti bergerak di antara ketiga komponen tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memahami atau mendapatkan pengertian yang mendalam, komprehensif dan rinci sehingga menghasilkan kesimpulan induktif sebagai hasil pemahaman dan pengertian peneliti.³⁴

³⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Jakarta: Rajawali, 2006), h. 110.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Makassar

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Makassar³⁵



Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822.³⁶

³⁵<http://makassarkota.go.id/105-sejarahkotamakassar.html>(Akses 25agustus 2018) Jam 10.12

³⁶Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2019 .
[http:// BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah.pdf](http://BAB%20II%20Gambaran%20Umum%20Kondisi%20Daerah.pdf) (Diakses pada 25 agustus 2018).

Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar.³⁷

Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km² menjadi 175,77 km² dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten lain yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan batas-batas daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan, lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.³⁸

Pada perkembangan, nama Kota Makassar dikembalikan lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat yang didukung DPRD Tk. II Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari kalangan budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pelaku bisnis.³⁹

Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut : Sebelah Utara : Kabupaten Maros

³⁷ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2019 . <http://BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah.pdf> (Diakses pada 25 agustus 2018).

³⁸ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2019 . <http://BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah.pdf> (Diakses pada 25 agustus 2018).

³⁹ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2019 . <http://BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah.pdf> (Diakses pada 25 agustus 2018).

Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa Sebelah Timur : Kabupaten Gowa dan Maros
Sebelah Barat : Selat Makassar.⁴⁰

Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan. Bagian utara kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, dan Kecamatan Ujung Tanah. Di bagian selatan terdiri atas Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini. Di bagian Timur terbagi atas Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang. Bagian barat adalah Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso.⁴¹

Hingga Tahun 2013 Kota Makassar telah berusia 406 tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar tanggal 9 Nopember 1607, terus berbenah diri menjadi sebuah Kota Dunia yang berperan tidak hanya sebagai pusat perdagangan dan jasa tetapi juga sebagai pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan edu-entertainment, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara.⁴²

B. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Pengawas Pemilu sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 2007, berbeda dengan pengawas pemilu, pada pemilu 2004. Pengawas penyelenggara pemilu menurut ketentuan UU No. 22 tahun 2007, dilakukan oleh badan

⁴⁰Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2019 .
[http:// BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah.pdf](http://BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah.pdf) (Diakses pada 25 agustus 2018).

⁴¹Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2019 .
[http:// BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah.pdf](http://BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah.pdf) (Diakses pada 25 agustus 2018).

⁴²Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2019 .
[http:// BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah.pdf](http://BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah.pdf) (Diakses pada 25 agustus 2018).

pengawas pemilu, yang disingkat bawaslu tingkat pusat, panitia pengawas pemilu (panwaslu) provinsi, panitia pengawas pemilu kabupaten/kota, panitia pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan, pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri.

Bawaslu ditingkat pusat, berbeda pada pemilu 2004, adalah bersifat tetap, sedangkan pengawas pemilu lainnya tetap bersifat *ad hoc* sama dengan pengawas pemilu pada pemilu 2004.

Apabila tugas dan wewenang bawaslu hanya mengawasi tahapan dan penyelenggaraan pemilu, rasanya sangat berlebihan memberikan status sebagai badan yang bersifat tetap, karena tugas pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, tidak dilakukan secara terus-menerus selama 5 tahun masa tugas bawaslu, paling hanya berlangsung selama 1 tahun. Sedangkan KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, yang tugasnya berlangsung terus-menerus selama 5 tahun masa tugasnya, antara lain memutakhirkan data pemilih, memelihara inventaris KPU, memelihara arsip/dokumen pemilu, melakukan sosialisasi/Pendidikan pemilih, serta mempersiapkan pemilu selanjutnya, dan lain-lain, masih dikritik pihak-pihak tertentu, karena KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dianggap “memakan gaji buta”. Oleh karena itu, penetapan bawaslu sebagai suatu badan yang bersifat tetap, lebih banyak didasarkan pada pertimbangan politis, daripada pertimbangan yuridis dan pragmatis. Sedangkan sifat tetap dari KPU, seperti kita ketahui sudah diatur

dalam konstitusi, yaitu pasal 22 E ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁴³

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang - Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 uu memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik. Rabu, 12 April Tahun 2017 Presiden Joko Widodo melantik Anggota Bawaslu Periode 2017-2022 dan Rapat Pleno Bawaslu menetapkan Ketua Bawaslu adalah Abhan⁴⁴.

1. Visi Bawaslu

Langsung atau tidak langsung, peningkatan kualitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu berupa pengawasan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa merupakan upaya kontinu dan konsistensi Bawaslu dalam berkontribusi secara signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan RKP. Peningkatan kualitas pelaksanaan

⁴³ H.Rozali Abdullah, Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif), (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.98.

⁴⁴<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu> (Akses 27 September 2018) Jam 17.30

tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa pemilu dapat dilihat dari: (1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; (2) adanya keterkaitan, sinkronisasi dan sinergi antar struktur, antar tugas, dan antar fungsi; (3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/ evaluasi; serta (4) adanya keterkaitan dan konsistensi antara RPJMN 2015-2019 dan RKP dengan Renstra Bawaslu. Keempat hal tersebut selain dapat menjadi indikator bagi peran Bawaslu dalam mendukung pencapaian target, sasaran, misi, dan visi RPJMN 2015- 2019, juga menjadi ukuran terlaksananya amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), yaitu: —agar menjadi lembaga— penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Oleh karena itu, Visi Bawaslu 2015-2019 adalah: “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”⁴⁵

Penjelasan Visi

Proses penyelenggaraan pemilu khususnya pengawasan harus melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) pemilu dan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pemilu di semua tahapan pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata pengawal terpercaya, demokratis, bermartabat, dan berkualitas adalah sebagai berikut:

⁴⁵<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu> (Akses 27 September 2018) Jam 17.30

- a. Pengawal : Berada di garda terdepan bersama masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu.
- b. Terpercaya: Melakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai asas dan prinsip umum penyelenggaraan pemilu demokratis.
- c. Demokratis : Melaksanakan pengawasan pemilu secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, adil, dan kompetitif yang taat hukum, bertanggung jawab (*accountable*), terpercaya (*credible*), dan melibatkan masyarakat (*participation*).
- d. Bermartabat : Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sesuai prinsip-prinsip moral sosial yang tinggi, seperti berani, tegas, bertanggung jawab, jujur, adil dan bijaksana.
- e. Berkualitas : Pemilu yang memiliki legitimasi baik proses maupun hasil yang ditentukan oleh kinerja pengawasan yang dapat diukur tingkat keberhasilannya (*aspects of performance*), strategi pengawasan yang dapat mencegah potensi, indikasi awal pelanggaran, dan penanganan dugaan pelanggaran secara cepat dan tepat (*aspects of design*), serta pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku (*aspects of conformance*).⁴⁶

⁴⁶ Mudiyyati Rahmatunnisa, *Mengapa Integritas Pemilu Penting?*, (Jurnal Bawaslu, ISSN 2443,2539, Vol. 3, No. 1, 2017)

2. Misi Bawaslu

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2015-2019. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid.
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.⁴⁷

Penjelasan Misi

Keenam Misi Bawaslu tersebut, yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu, dimaksudkan untuk mencapai Visi Bawaslu: “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya Dalam Penyelenggaraan Pemilu

⁴⁷<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu> (Akses 27 September 2018) Jam 17.30

Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”. Hal itu juga menegaskan bahwa Bawaslu bertanggungjawab menghasilkan pemilu Presiden Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan kepala daerah: Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Walikota-Wakil Walikota, yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas: transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.⁴⁸

Agar pengawasan pemilu dapat dilaksanakan sesuai amanat undang-undang, maka diperlukan aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri, dan solid. Misi pertama ini sangat penting dan strategis karena merupakan pondasi utama dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Misi ini merupakan kunci pertama dan utama untuk memasuki pelaksanaan pengawasan. Setelah melewati langkah pertama, Bawaslu akan memasuki pelaksanaan pengawasan. Pada tahap ini Bawaslu mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan yang adaptif dengan perkembangan lingkungan strategis sebagai misi keduanya. Pola dan metode pengawasan sangat diperlukan karena merupakan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan pemilu untuk memastikan

⁴⁸ Mudiyyati Rahmatunnisa, *Mengapa Integritas Pemilu Penting?*, (Jurnal Bawaslu, ISSN 2443,2539, Vol. 3, No. 1, 2017)

semua tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan Bawaslu dapat berjalan efisien dan efektif.⁴⁹

Namun misi kedua itu tidak akan berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh suatu sistem kontrol dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis, dan integratif. Atas dasar itu, maka Bawaslu perlu menetapkan misi ketiganya, yaitu memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi. Misi ini penting untuk mengetahui kinerja pengawasan pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat dan transparan.

Konsisten dengan misi pertama, kedua, dan ketiga, Bawaslu melalui pengalaman dalam pengawasan pemilu dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan pemilu ke depan. Dengan demikian, secara tidak langsung Bawaslu berperan sebagai lembaga “think tank” pertama, utama, dan strategis dalam perumusan kebijakan pemilu. Argumennya adalah pemanfaatan pola dan metode pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan pemilu, tidak hanya terbatas pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan pemilu, tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pemilu selanjutnya.⁵⁰

Hasil pelaksanaan pengawasan Bawaslu selain dapat menjadi masukan bagi pemerintahan dan masyarakat, juga dalam rangka proses penyusunan RPJMN dan RKP dalam mengatasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan pemilu. Peran Bawaslu sebagai lembaga “think tank” pertama, utama, dan strategis sangat

⁴⁹<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu> (Akses 27 September 2018) Jam 17.30

⁵⁰<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu> (Akses 27 September 2018) Jam 17.30

penting untuk dua hal, yaitu: secara internal akan meningkatkan citra Bawaslu, dan secara eksternal akan meningkatkan citra pemerintahan, dimana keduanya merupakan bagian dari proses pembangunan citra kelembagaan negara dalam memperkuat kapabilitas simbolik sistem politik Indonesia. Dengan citra itu, langsung atau tidak langsung, Bawaslu pada tahap pertama, telah mempersiapkan landasan kokoh bagi pelaksanaan misi keempatnya, yaitu membangun kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu secara cepat, akurat dan transparan.⁵¹

Kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya seiring dengan meningkatnya kualitas kinerja pengawasan, yang indikatornya adalah cepat, akurat dan transparan. Citra itu juga menjadi modal dasar untuk melaksanakan misi kelima, yaitu meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif. Kepercayaan publik terhadap kualitas kinerja pengawasan Bawaslu merupakan prasyarat untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, yaitu pengawasan yang melibatkan masyarakat, peserta pemilu, dan lembaga lain. Tentu amat sulit membayangkan hadirnya pengawasan partisipatif bila masyarakat, peserta pemilu, dan lembaga lain tidak percaya terhadap kinerja Bawaslu.⁵²

Sebaliknya, jika Bawaslu dapat menjadi lembaga pengawal terpercaya, maka misi keenamnya sangat mudah dilakukan, yaitu menjadikan Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri

⁵¹<https://www.bawaslu.go.id/Id/Profil/Sejarah-Pengawasan-Pemilu> (Akses 27 September 2018) Jam 17.30

⁵²www.bawaslu.go.id/id/profil/rencana-strategis-bawaslu (akses 25 agustus 2018) jam 17.30

maupun pihak dari luar negeri. Untuk mewujudkan semua itu, Bawaslu harus melaksanakan keenam misi secara utuh dan terpadu.⁵³

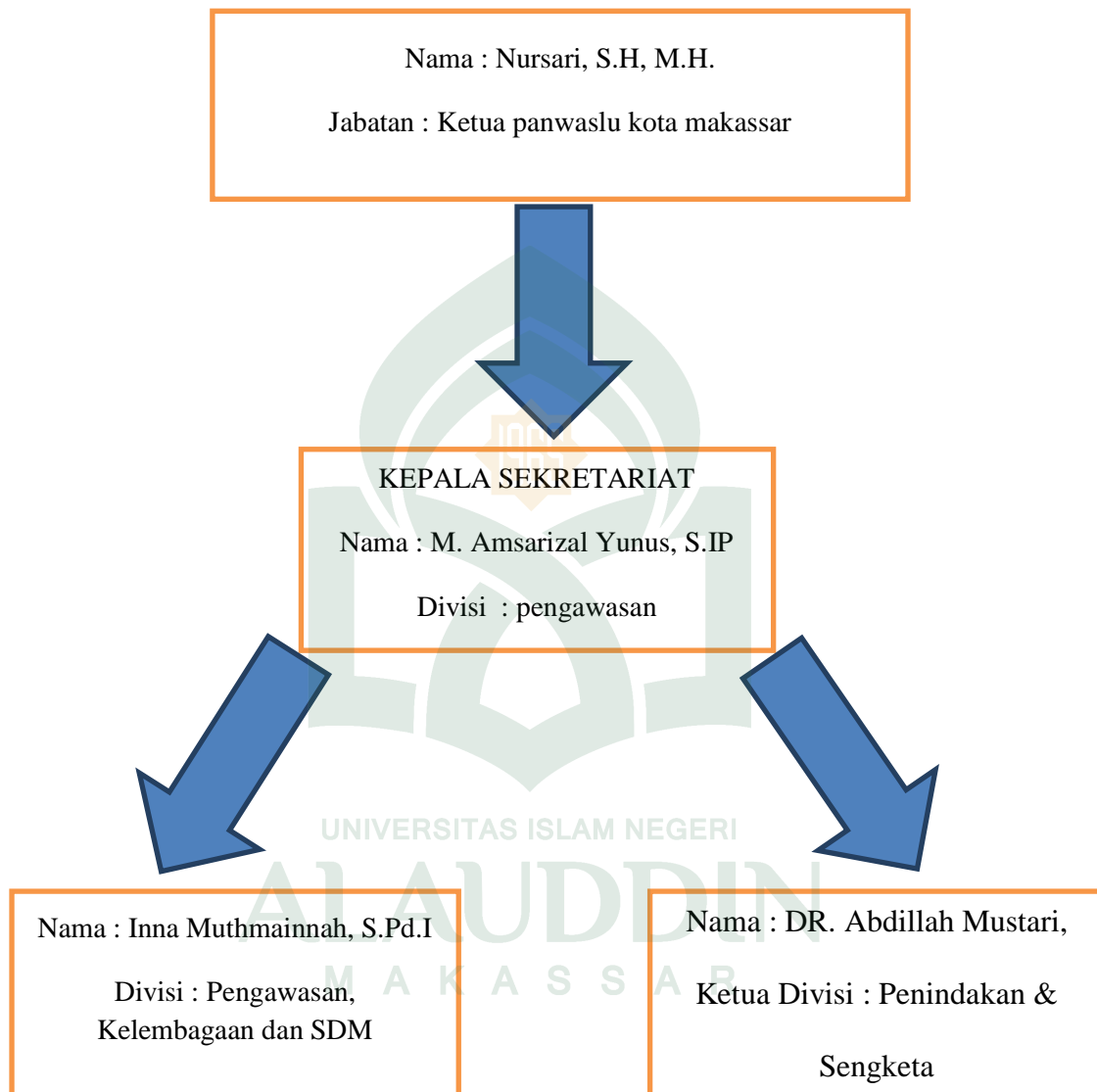
C. Profil Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Makassar adalah lembaga penyelenggara Pemilu/Pilkada yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan UU Penyelenggara Pemilu. Keberadaannya saat ini masih dalam proses transisi, dimana secara eksistensial masih dibentuk atas perintah UU Pilkada yang masih menempatkan lembaga pengawas tingkat kab/kota bersifat sementara *ad hoc* sampai proses pilkada selesai.

Dilain sisi, Undang-undang Pemilu yang telah disahkan, dimana keberadaan lembaga pengawas tingkat Kab/Kota adalah lembaga tetap seperti halnya KPU Kab/Kota, yang berubah nama menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab/Kota. Lepas dari eksistensi lembaga tersebut, Panwaslu Kota Makassar sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, bertekad untuk mengemban amanah sebagai pengawas jalannya proses demokratisasi, khususnya dalam event Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, yang saat ini tahapan keduanya sedang berlangsung.

⁵³<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu> (Akses 27 September 2018) Jam 17.30

Komisioner Panwaslu Kota Makassar⁵⁴



⁵⁴Sumber Data Panwaslu Kota Makassar Tanggal 14 agustus 2018

D. Peran Panwaslu Dalam Konflik Pemilukada Di Kota Makassar Tahun 2018

Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menggariskan enam kriteria pemilu demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁵⁵

Peran panwaslu berperan penting dalam mengawal tahapan penyelenggaraan Pemilu, yang meliputi anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk berperan aktif, tidak hanya penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, untuk mengonstruksi pemilu berkualitas dan berintegritas bagi kemajuan bangsa. adapun wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pak Nursari, S.H, M.H selaku Ketua Panwaslu Kota Makassar adalah sebagai berikut:

“kami Panwaslu adalah meyelenggara dalam hal pengawasan pemilukada dikota Makassar kami menyadari bahwa peran panwaslu berperan penting dalam mengawal pemilukada yang jujur dan adil tanpa ada kecurangan-kecurangan, karena kita berpegang pada UU 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu dan kewajiban kita sebagai badan pengawas pemilu sebagai Panwaslu”⁵⁶

⁵⁵<http://Nasional.Kompas.Com.Peran-Bawaslu-Dan-Pemilu-Yang-Berintegritas>. (Diakses 26 September 2018) Jam 12.00.

⁵⁶ Wawancara Dengan bapak Nursari (ketua Panwaslu Makassar, 28september 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Peran panwaslu menjadi sangat penting bagi terselenggaranya pemilu yang adil dan jujur, bukan hanya panwaslu bahkan semua pihak harus berperan aktif untuk bertanggung jawab bersama demi terciptanya demokrasi yang jujur sesuai amanat UU No. 15 Tahun 2011 Produk hukum ini mengatur penyelenggaraan Pemilu itu sendiri mengenai kesiapan dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Beberapa lembaga tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas, dan kewenangannya masing-masing. Undang-undang ini hadir untuk memperbaiki penyelenggaraan Pemilu sebelumnya yaitu tahun 2009 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007. Perbaikan itu mencakup perbaikan jadwal dan tahapan serta persiapan yang semakin memadai.

Adapun Kewajiban Panwaslu Kabupaten/Kota :

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan dibawahnya.
- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang – undangan mengenai pemilu

- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada panwaslu provinsi, sesuai dengan tahapan pemilu secara periodic dan/atau berdasarkan kebutuhan.
- e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada panwaslu provinsi, berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota, yang mengakibatkan terganggunya penyelenggara tahapan pemilu di tingkat kabupaten/kota.
- f. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.⁵⁷

Sejatinya, pemilu harus berjalan baik secara prosedural dan substansial. Pemilu baik secara prosedural jika prasyaratnya sudah terpenuhi dan pemilu berhasil secara substansial jika tujuannya tercapai. Prasyarat pemilu menggariskan adanya kebebasan dalam memilih, terwujudnya partisipasi masyarakat, dan arena berkompetisi politik yang *fair*. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan pemilu adalah terpilihnya pemimpin yang menjadi kehendak rakyat. Pemimpin amanah yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.⁵⁸

Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan

⁵⁷H.Rozali Abdullah, Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif), (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 110-111.

⁵⁸<http://Nasional.Kompas.Com.Peran-Bawaslu-Dan-Pemilu-Yang-Berintegritas>. (Diakses 26 September 2018) Jam 12.00.

yang optimal. Panwaslu juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. Secara historis, kelahiran Panwaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.⁵⁹

Agar berperan efektif, setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada serta mampu memberikan efek jera bagi upaya mengurangi potensi pelanggaran sehingga tujuan keadilan pemilu dapat tercapai. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Nursari, S.H, M.H selaku Ketua Panwaslu Kota Makassar mengenai konflik Pemilukada di Kota Makassar ialah sebagai berikut:

*“kami panwaslu harus hadir menjadi solusi terhadap konflik – konflik yang terjadi di pemilukada kota makassar dan berbagai tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk kepada penyelenggara pemilu karena mereka tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran, terlebih jika integritasnya tidak cukup baik tentu mereka tidak akan mampu menghadapi godaan dari berbagai pihak , UU No7 Tahun 2017, tentang pemilihan umum juga memperkuat wewenang kami sebagai panwaslu tak lagi sekedar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor dan pemutus perkara ”.*⁶⁰

Berangkat dari visi Bawaslu RI yaitu “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”. Panwaslu Kabupaten/Kota dibentuk guna untuk menjalankan roda pemilihan umum agar lebih kondusif dan berjalan secara damai

⁵⁹<http://Nasional.Kompas.Com.Peran-Bawaslu-Dan-Pemilu-Yang-Berintegritas>. (Diakses 26 September 2018) Jam 12.00.

⁶⁰ Wawancara Dengan bapak Nursari (ketua Panwaslu Makassar, 28september 2018)

di tahun politik ini. Dalam menjalankan tupoksinya, Panwaslu Kota Makassar dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengawasi jalannya proses pemilukada tingkat kab/kota. Selama kinerja Panwaslu Kota Makassar dibentuk pada September 2017 berbagai kegiatan pengawasan hingga pencegahan telah dilakukan, salah satu kinerja Panwaslu dalam pengawasan adalah mengawasi kegiatan-kegiatan pasangan calon mulai dari tahap pendaftaran, kampanye, hingga pengawasan sampai hari pemungutan suara.⁶¹

Undang-undang pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menjelaskan bahwa Panwaslu yang sebelumnya hanya mengawasi dan mencegah sekarang sudah bisa menyelenggarakan sidang sengketa pemilu sehingga Panwaslu kab/kota mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu bilamana ada pihak-pihak yang menggugat atau yang merasa dirugikan dalam proses pemilukada berlangsung. Laporan yang masuk akan ditindaklanjuti kemudian, jika terbukti adanya unsur pelanggaran maka pihak Panwaslu kab/kota berhak mengadakan dan menyelesaikan sidang sengketa tersebut. Pada saat penulis melakukan penelitian bersamaan juga dengan dilaksanakannya sidang sengketa antara pihak pemohon pasangan Appi-Cicu terhadap tergugat pasangan Danny Pomanto-Indira Mulyasari.⁶²

Sidang sengketa tersebut antara lain pemakaian slogan $2x+\sqrt{\quad}$ (dua kali tambah baik) yang merupakan slogan pemerintah tapi digunakan untuk

⁶¹Sumber Data Panwaslu Kota Makassar Tanggal 14 agustus 2018

⁶²Sumber Data Panwaslu Kota Makassar Tanggal 14 agustus 2018

kepentingan kampanye, pemasangan baliho/spanduk di beberapa titik kecamatan sebelum tahapan kampanye, pemasangan spanduk di depan kantor-kantor pemerintahan (Kecamatan, Kelurahan, dan Dinas), pembagian smartphone kepada RT/RW se-Kota Makassar, ketidaknetralan PNS Pemkot Makassar, pengangkatan 3000 tenaga honorer, dll. Bentuk pengawasan yang dilakukan Panwaslu yaitu pengumpulan laporan-laporan baik pengawas tingkat kelurahan sampai kecamatan, laporan langsung masyarakat, dan temuan langsung oleh Panwaslu pada saat menjalankan aktivitas maupun program kerja, sehingga pengawasan yang dilakukan Panwaslu bersifat linear (partisipatif).⁶³

Seperti wawancara penulis terhadap salah satu komisioner, Mutmainnah, S.Pd :

*“Pengawasan yang kami lakukan adalah hasil laporan-laporan masyarakat terkait kecurangan pemilu, baik berupa kecurangan kampanye, politik uang, hingga kecurangan administratif yang dilakukan pasangan, tim sukses, kerabat atau masyarakat awam yang dengan sengaja melakukan kecurangan, hingga penemuan langsung oleh komisioner pada saat berkegiatan”.*⁶⁴

Terkait dari wawancara tersebut penulis menganalisa bahwa pengawasan yang dilakukan Panwaslu masih terkait dengan laporan-laporan dan temuan langsung yang dilakukan Panwaslu. Walaupun terbilang belum cukup efektif namun dari laporan masyarakat tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk pengawasan tingkat paling rendah karena sedikitnya jumlah komisioner yang membidangi bagian pengawasan di Panwas tingkat kab/kota sampai Panwas

⁶³Sumber Data Panwaslu Kota Makassar Tanggal 14 agustus 2018

⁶⁴ Wawancara di kantor Panwaslu, Makassar (28 september 2018 pukul 10.00-10.45 Wita)

Kecamatan dan Kelurahan sehingga pengawasan hanya langsung dari pelaporan masyarakat saja.

Ancaman terhadap kualitas pemilu di kota Makassar yang disebabkan konflik berkepanjangan bukan halnya konflik fisik semata namun konflik sejatinya adalah benturan perbedaan pendapat yang dimana konflik bisa berbentuk *soft clash* dan *hard clash*. Rentang waktunya pun akan panjang tidak hanya dalam tahapan kampanye, namun bisa meluber sampai ke hari H pemilihan. sebagai solusinya bawaslu dan KPU semestinya mengedepankan pendekatan dialog, komunikasi, dan koordinasi secara terbuka satu sama lain. Sebagaimana yang terjadi di Makassar terjadi konflik antara KPU Dan Panwaslu tentang Penggugatan Calon Appi-Cicu terkait Pelanggaran yang dilakukan Oleh DIAMI yang menganggap melanggar Pasal 71 ayat 3 dengan menyoroti 3 kebijakan Danny sebagai petahana yang dianggap bertentangan dengan pasal itu. Ketiga kebijakan itu yakni pembangian handphone kepada RT/RW, pengangkatan tenaga kontrak dan penggunaan tagline 2x+baik.⁶⁵

Adapun wawancara yang dilakukan kepada masing-masing Timses adalah:

*“Kami selaku Timses awalnya kecewa karena gugatan kami di Panwas ditolak ato tidak diterima karena tidak memenuhi legal standing, sehingga kami menempuh jalur hukum lain yaitu melakukan gugatan ke KPU Kota Makassar melalui PT-TUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) dan Alhamdulillah gugatan kami diterima dan menyuruh KPU untuk menetapkan calon tunggal di Pilwali Kota Makassar”.*⁶⁶

⁶⁵<http://makassar.tribunnews.com/2018/03/21/inilah-pasal-penyebab-danny-indira-didiskualifikasi-pt-tun-petahana-ini-juga-pernah-merasakannya>

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Asmir Mursalim (Selaku Timses APPI-CICU, 25 Desember 2018)

“Kami sangat kecewa dengan putusan yang dilakukan oleh KPU dengan menggugurkan calon kandidat kita-DIAmi selaku pasangan no 1. diami petahana dianggap melanggar sehingga terjadinya bentrok pertikaian antar pendukung paslon yang tidak menerima jika ada salah satu pasangan yang di diskualifikasi dan inilah yg meenjadi pemicu konflik Pilkada Kota Makassar tahun 2018”⁶⁷.

Wawancara Penulis dengan beberapa masyarakat adalah:

“Muh. Naisrun Aprianto, saya pribadi kecewa dan merasa tidak punya pilihan ketika dihadapkan dengan calon tunggal, bahkan saya menganggap tidak perlu ada Pilkada lagi jika tidak ada alternatif calon Kepala Daerah lain yang saya bisa pilih”⁶⁸.

“Amal Nugraha, setuju jika Paslon nomor 1 DIA-mi didiskualifikasi karna tidak sepatasnya pemimpin melakukan pelanggaran seperti itu, saya selaku masyarakt masih tetap bisa memilih kotak kosong yang disediakan di tempat pemungutab suara. Dengan begitu, proses kompetisi masih bisa berlaangsung, Pilkada tetap bisa berjalan kompetisi tetap ada walaupun melawan kotak kosong”⁶⁹.

Adapun wawancara dengan Ketua Panwas terkait hal itu adalah:

“Kami sebagai Panwas menganggap bahwa Gugatan Appi-Cicu Sama Sekali Tidak memiliki Legal Standing dengan putusan yang sifatnya final (dan mengikat. Dalil penolakan panwaslu sangat jelas, bahwa, tiga dalil yang menjadi gugatan Appi - Cicu sama sekali tidak memiliki legal standing. Sehinga Appi - Cicu tidak puas, upaya hukum lainnya pun ditempuh. Appi - Cicu melayangkan gugatannya kepada KPU Makassar melalui PTTUN dengan sangkaan yang sama saat bermohon di Panwas Makassar yakni UU No.10 tahun 2016 pasal 71 ayat (3) tentang penyalahgunaan kewenangan dengan dalil yang sama dan telah dilegitimasi oleh panwaslu melalui putusannya yang menyatakan, ditolak.dan akhirnya PT-TUN menerima Gugatan Appi-Cicu untuk menggugurkan calon Patahana dan menyuruh KPU untuk menetapkan Calon Tunggal di Pilwali Kota Makassar.

Senada dengan wawancara dengan Kepala Sekretariat Panwaslu Adalah:

“Dalam Konflik Yang terjadi di Makassar seharusnya ada kerjasama atau keordinasi Antara KPU dan Panwaslu terkait dengan Konflik tersebut, agar tidak terjadi perbedaan mengenai pengguguran salah Satu calon

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak H.M. Tutu (Selaku Timses DIA-mi, 25 Desember 2018)

⁶⁸ Wawancara dengan Muh. Naisrun Aprianto (Masyarakat, 27 Desember 2018)

⁶⁹ Wawancaara dengan Amal Nugraha (Masyarakat, 27 Desember 2018)

pilwali Makassar dan masyarakat juga tidak berkonflik antar sesama pendukung akibat dari perbedaan pendapat antara Panwaslu dan KPU.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya konflik yang terjadi di pemilukada dikota Makassar bukan berarti konflik fisik semata. Konflik sejatinya ialah benturan perbedaan pendapat. Yang banyak melukai hati masyarakat, Yang rentang waktunya pun akan panjang tidak hanya dalam tahapan kampanye, namun bisa meluber sampai ke hari H pemilihan yang dimana calon yang di diskualifikasi akan memkampanyekan kolom kosong.

Adapun wawancara penulis dengan abdillah mustari selaku divisi penindakan sengketa mengenai konflik pilwali dikota makassar adalah sebagai berikut :

“Bentuk peran kami selaku Panwaslu dalam konflik Pilwali di Kota Makassar adalah tidak menerimanya gugatan Appi-Cicu agar Pemilukada di Kota Makassar tidak berjalan dengan satu calon tunggal agar tidak menimbulkan konflik antar pendukung Paslon, kami juga mengawal pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan KPU. Mengawal dalam arti ikut serta dalam menjalankan proses sosialisasi, walaupun sebenarnya kewenangan sosialisasi itu ada pada KPU namun kami panwaslu selalu mencoba ikut serta melakukan sosialisai kepada masyarakat khususnya dalam keadaan tertentu”⁷⁰.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya sosialisasi menjadi langkah pemahaman terhadap masyarakat luas, karena dengan pahamnya masyarakat akan hadirnya Panwaslu dan pemahaman akan tugas pokok dan fungsi Panwaslu, maka masyarakat akan lebih mudah melaporkan kejadian – kejadian yang tidak sepatutnya terjadi saat Pemilu. Selain itu adanya deteksi dini dari Panwaslu yang di tugaskan kepada Panwas TPS untuk mengirimkan foto hasil

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Abdillah Mustari (Selaku Devisi Penindakan Sengketa, 25 Desember 2018)

perhitungan di masing – masing TPS. Hal ini dimaksudkan guna menjadi acuan panwas apabila terjadi pelanggaran dalam bentuk pengelembungan suara di KPU.

Penyelenggaraan pemilu, sangat sulit di hindari terjadinya pelanggaran dan sengketa, karena dalam penyelenggaraan pemilu banyak sekali kepentingan yang terlibat, apalagi secara jujur harus kita akui, bahwa tingkat kesadaran berdemokrasi masyarakat kita, relatif masih rendah, yang perlu kita jaga , agar pelanggaran dan sengketa tersebut tidak menimbulkan gejolak dan tindakan anarkis dalam masyarakat, jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah ini, adalah dengan cara menyelesaikan semua pelanggaran dan sengketa melalui jalur hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Undang – undang No. 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Telah mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran dan sengketa yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu.⁷¹

E. Faktor Yang Menjadi Kendala Panwaslu Dalam Konflik Pilkada

Dinamika politik lokal pasca rezim orde baru memang terasa geliatnya, apalagi praktek-praktek pilkada menjadi semarak karena memang elit politik yg menjadi aktor politik yg aktif berpolitik. tetapi fenomena konflik juga menjadi sesuatu yg tidak bisa dihindarkan dari rezim pilkada langsung yg berlangsung dari awal diberlakukannya sampai hari ini. seperti hasil riset The Habibie Centre, saat pilkada digelar 2005-2013 telah terjadi konflik pilkada yg skalanya cukup beragam yg terjadi di 10 provinsi di Indonesia. Data penelitian menunjukkan sedikitnya

⁷¹ H.Rozali Abdullah, Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif), (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.265

terdapat 585 kasus kekerasan dalam pilkada yg mengakibatkan korban tewas 47 orang, cedera 510 orang, bangunan rusak 416 buah. kemudian Internasional Crisis Group dalam tahun 2010 mencatat sekitar 10% dari 200 Pilkada yg digelar sepanjang tahun 2010 diwarnai aksi kekerasan. seperti di Mojokerto, Jawa Timur, Tanah Toraja, dan Toli-Toli di Sulteng. ICG menyebutkan kekerasan dalam pilkada antara lain dipicu Lemahnya posisi penyelenggaraan Pemilu seperti KPU Kabupaten/kota dan Panwaslu.

Fenomena hari ini ternyata masih juga terjadi dengan paradigma pilkada serentak, konflik seringkali dipicu oleh masalah data pemilih, Netralitas Penyelenggaraan pemilu dan kurangnya dari peserta pemilu patuh terhadap peraturan yang ada. kemudian ada juga konflik yang bersumber dari mobilisasi politik atas nama etnik, agama dan daerah. konflik juga bisa berasal dari kampanye negative antar pasang calon kepala daerah. Konflik juga bersumber dari premanisme politik dan pemaksaan kehendak, konflik juga bersumber dari manipulasi kecurangan suara hasil pilkada dan perbedaan penafsiran terhadap aturan main. pasca pilkada konflik juga bisa terjadi konflik perbedaan penafsiran dari segi hukum atas hasil pemilihan dan juga konflik bisa juga terjadi adanya kelompok pendukung yang tidak menerima hasil pemilihan sehingga protes dan tindakan anarkis, hasil pemilihan yang cacat hukum dan adanya isu politik uang dan lain sebagainya. Penting adanya mekanisme manajemen konflik dalam pengelolaan konflik tersebut. baik resolusi konflik secara non litigasi maupun

secara litigasi. sehingga Pilkada damai tetap berlangsung sesuai dengan koridor demokrasi dan mampu melakukan konsolidasi demokrasi diranah publik.⁷²

Kembali pada pokok untuk mengantisipasi kerawanan dan potensi konflik pada pilkada 2018, KPU perlu perlu menyadari paling tidak ada belasan potensi konflik seperti kurangnya sosialisasi UU pilkada, peraturanawaslu, peraturan KPU, Selain itu juga kemungkinan keterlibatan aparatur sipil negara, oknum TNI/Polri, politik uang, kecurangan pada perhitungan dan rekapitulasi suara, penyelenggara yang berpihak, pengawas yang tidak adil, kampanye hitam, dan konflik akibat persaingan antar partai, antarkandidat, atau antar pendukung calon. Sengketa pemilu juga merupakan tahap krusial terjadinya konflik.

Selagi cukup masih banyak waktu dalam tahapan pelaksanaan pilkada, KPU danawaslu harus menggeggencarkan sosialisasi dan bimbingan teknis dan jajaran penyelenggara dan pengawas pemilu, juga ke masyarakat, agar semua memperoleh pemahaman yang sama, tidak ada tafsir yang berbeda-beda.

Untuk mencegah kemungkinan keterlibatan aparatur sipil negara atau pemanfaatan fasilitas negara serta keterlibatan oknum TNI/polri untuk pilkada bagi kepentingan calon tertentu, perlu ada nota kesepahaman antara KPU,awaslu, kemendagri, komisi aparatur sipil negara, kementerian PANRB, TNI/Polri, dan badan kepegawaian negara.

⁷²Konflik pilkada <https://kumparan.com/suyito-suyito/konflik-pilkada> (Akses 01 oktober 2018) Jam 17.30

Sosialisasi pemilu damai juga mutlak digencarkan, KPU wajib mengimbau semua pihak untuk semua pihak turut serta menciptakan suasana pilkada yang aman, damai dan tertib. Kepada setiap calon kepala daerah dan masing-masing pendukungnya perlu diingatkan kembali untuk siap menang dan siap kalah. Penyelenggara pemilu juga harus berkomitmen kuat untuk bersikap netral dan bukan partisan, dan melembagakan nilai-nilai budaya positif.⁷³

Panwaslu juga memiliki sejumlah kendala dan kelemahan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum pemilu khususnya pelanggaran pemilu, di antaranya adalah:

- a. Perkembangan persoalan pemilu selalu lebih cepat daripada perkembangan teknis pengawasan pemilu yang masih bersifat konvensional.
- b. Regulasi teknis pengawasan serentak belum tersedia secara memadai
- c. Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (ad hoc)
- d. Tidak tercukupinya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari Negara
- e. Kewenangan penyelesaian sengketa di tingkat Panwaslu Kabupaten/Kota belum diimbangi dengan kapasitas Panwaslu Kabupaten/Kota
- f. . Letak geografis penyelenggaraan pemilu sebagian sulit dijangkau oleh pengawas pemilu.⁷⁴

⁷³<https://jambi.antaranews.com/berita/322126/masukan-bagi-kpu-mengatasi-konflik-pilkada-2018> (Akses 30 September 2018) Jam 20.30

⁷⁴ H.Rozali Abdullah, Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif), (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.263

Peluang dan Tantangan Pengawasan pemilu memiliki peluang dan tantangan. Beberapa peluang yang dapat dioptimalkan oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, yaitu:

1. Ekspektasi publik yang tinggi terhadap pelaksanaan pemilu yang berkualitas
2. Komitmen DKPP dalam menegakkan integritas penyelenggara pemilu;
3. Dukungan masyarakat terhadap pengawasan pemilu, baik dalam pencegahan dan penindakan maupun dalam penyelesaian sengketa;
4. Keterbukaan KPU dalam perumusan rancangan teknis penyelenggaraan tahapan pemilu;
5. Ketersediaan kelompok-kelompok strategis untuk terlibat dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan tugas kewenangan penyelesaian sengketa pemilu, dan penegakan hukum pemilu.

Selain peluang tersebut, panwaslu juga memiliki ancaman yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komitmen penegakan hukum yang belum memadai yang dicerminkan oleh belum tersedianya sistem penegakan hukum yang lebih khusus terkait penegakan pidana pemilu;
2. Masih rendahnya komitmen peserta pemilu dalam menolak praktek politik uang, penyalahgunaan jabatan dan kewenangan, serta pencegahan konflik

yang dicerminkan oleh belum memadainya pengaturan pelaksanaan pemilihan gubernur-wakil gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan WalikotaWakil Walikota;

3. Pemilu serentak tidak disertai dengan pembangunan kapasitas kelompokkelompok strategis yang dapat mendukung keberlangsungan pemilu;
4. Mekanisme penegakan hukum yang melibatkan pihak lain, seperti kejaksaan dan kepolisian, sebagai bentuk respon terhadap pelaksanaan pemilu serentak, belum terbangun secara sistematis;
5. Masyarakat apriori terhadap independensi dan kualitas putusan lembaga peradilan akibat terjadinya preseden penegakan hukum, yang berdampak pada keraguan masyarakat dalam penyelesaian sengketa; dan
6. Pesimisme masyarakat terhadap kinerja Bawaslu yang belum sesuai harapan. Padahal kinerja Bawaslu sangat banyak ditentukan oleh faktor eksternal Bawaslu, seperti regulasi, sistem Pemilu, struktur, kultur, personil, anggaran, sarana-prasarana, dan kerjasama antar lembaga.⁷⁵

Panwaslu merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap jalanya penyelenggara pemilihan umum. Namun masih banyak kendala dan hambatan yang di hadapi panwaslu kota makassar dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu

⁷⁵ Mudiyyati Rahmatunnisa, *Mengapa Integritas Pemilu Penting?*, (Jurnal Bawaslu, ISSN 2443,2539, Vol. 3, No. 1, 2017)

Berdasarkan hal-hal tersebut tugas panwaslu dalam hal sosialisai penyelenggaraan pemilu masih perlu di tingkatkan karena pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan pemilu masih minim. Faktor yang menjadi kendala panwaslu dalam pemilukada di Kota Makassar menurut wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ono salah satu anggota Panwaslu Makassar divisi penindakan sengketa adalah :

“ 1. faktor struktur, meliputi, Panwas dibentuk pada saat tahapan pemilu berlangsung karena panwas bersifat ad hoc, Jumlah personil yg masih kurang, sarana penunjang, tidak sebanding tugas dan wewenang dengan dana operasional 2.faktor substansi berupa regulasi/aturan yang dibuat oleh pemerintah yang memiliki banyak celah sehingga dapat memungkinkan seseorang melakukan pelanggaran pemilu 3.faktor culture budaya, dalam perkembangan budaya politik bisa timbul karena adanya sifat kekerabatan antara pemerintah dengan calon kepala daerah, sehingga dalam penyelenggaraan pemilu masyarakat memilih bukan berdasarkan hati nurani yang sesuai dengan kapasitas dan elektabilitas dari calon kepala daerah tapi berdasarkan asas kedaerahan.”⁷⁶

Senada dengan wawancara dengan ketua panwaslu kota makassar terkait dengan kendala panwaslu dalam pemilukada kota makassar adalah :

“hal yang penting dalam pemilukada pemerintah harus lebih serius dalam membuat aturan /regulasi yang benar – benar demi kepentingan masyarakat.selain masalah regulasi, pemerintah juga harus memperhatikan dana, ditambah jumlah PPL yang tidak sebanding dengan jumlah luas wilayah yang harus di awasi”⁷⁷

Terkait dari wawancara tersebut penulis menganalisa terkait faktor yang menjadi kendala yang dihadapi panwaslu pemerintah harus membuat regulasi pemilu yang bersifat jangka panjang serta penguatan kewenangan panwaslu di

⁷⁶ Wawancara dengan salah satu anggota panwaslu Ono (divisi penindakan sengketa, tgl 01 oktober 2018)

⁷⁷ Wawancara Dengan bapak Nursari (ketua Panwaslu Makassar, 01september 2018)

pertegas. Karena selama ini regulasi yang dibuat pemerintah pembuatanya penuh dengan nuansa politik , di keluarkan pada saat mendekati pemilu serta isinya penuh dengan celah yang dapat di manfaatkan seseorang untuk melakukan pelanggaran. Selain itu adapun solusi yang meningkatkan kinerja panwaslu seperti yang dikemukakan komisioner , Mutmainnah, S.Pd :

“Peningkatan kualitas individu yang ada di internal panwaslu. Seperti proses perekrutan yang harus dilakukan dengan adil, jujur serta mengedepankan 1, independe panwaslu dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu harus bekerja secara bebas dan tanpa campur tangan dari pihak manapun 2, tidak berpihak /netralitas. Panwaslu kota makassar dalam melakukan pengawasan terhadap jalanya penyelenggara pemilu harus mencerminkan sikap yang tidak berpihak kepada salah satu calon tertentu serta menguntungkan pihak lain ”⁷⁸

Panwaslu merupakan lembaga negara yang idealnya melakukan kewenanganya sebagai pengawas pemilu dalam setiap penyelenggaraan pemilu, untuk menciptakan pemilu yang demokratis bukan hanya tanggung jawab hanya di bebaskan kepada Panwaslu tapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu bawaslu RI membuat sebuah program yang dinamakan “RELAWAN” (Gerakan sejuta Relawan Pengawas Pemilu). Program ini di maksud kan agar masyarakat ikut andil dalam hal pengawasan pemilu.⁷⁹

⁷⁸ Wawancara dengan salah satu anggota (komisioner panwaslu Mutmainnah, 03 oktober 2018)

⁷⁹Didik supriyanto, penguatan bawaslu optimalisasi posisi, organisasi dan fungsi dalam pemilu 2014,(jakarta : direktur eksekutif perludem,2012).h.182

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan memaparkan pokok-pokok atau kesimpulan dari temuan yang diperoleh dalam penelitian, serta saran atau rekomendasi yang relevan dengan masalah penelitian. Temuan pokok atau kesimpulan dalam penelitian akan menunjukkan sejauh mana penelitian memberikan kontribusi pada dunia keilmuan dan dunia praktis berkaitan dengan hal yang diteliti.

1. Panwaslu berperan penting dalam mengawal tahapan penyelenggaraan Pemilu, terutama dalam pilkada di kota makassar. Hal ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk berperan aktif, tidak hanya penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, untuk mengonstruksi pemilu berkualitas dan berintegritas bagi kemajuan bangsa, namun peran panwaslu di pemilukada kota makassar belum cukup efektif ancaman terhadap kualitas pemilu di kota Makasar yang disebabkan konflik berkepanjangan bukan halnya konflik fisik semata namun konflik sejatinya adalah benturan perbedaan pendapat yang dimana konflik bias berbentuk soft clash dan hard clash. Rentang waktunya pun akan panjang tidak hanya dalam tahapan kampanye, namun bisa meluber sampai kehari H pemilihan..

2. Faktor yang menjadi kendala Panwaslu dalam konflik pilkada di kota makassar yaituantara lain:

- a) Perkembangan persoalan pemilu selalu lebih cepat daripada perkembangan teknis pengawasan pemilu yang masih bersifat konvensional.
- b) Regulasi teknis pengawasan serentak belum tersedia secara memadai
- c) Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (ad hoc)
- d) Tidak tercukupinya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari Nsegara
- e) Kewenangan penyelesaian sengketa di tingkat Panwaslu Kabupaten/Kota belum diimbangi dengan kapasitas Panwaslu Kabupaten/Kota;
- f) Letak geografis penyelenggaraan pemilu sebagian sulit dijangkau oleh pengawas pemilu.

B. Saran-Saran

1. Pengawasan pilkada serentak di kota makassar harus di mulai dari panwaslu kota makassar sampai pengawasan tingkat kelurahan, hal ini di perlukan untuk mencegah timbulnya konflik kecil antar masyarakat agar tidak menjadi konflik yang besar di kemudian hari, pengawasan yang dilakukan bisa lebih memanfaatkan program yang ada berupa komunikasi dan perlu

adanya kordinasi antara panwaslu dan kpu dalam hal pelanggaran – pelanggaran pemilu yang terjadi dikota Makassar sehingga tidak menimbulkan konflik antar pendukung paslon yang banyak melukai hati masyarakat

2. Sosialisasi pemilu damai harus digencarkan, KPU dan Panwaslu wajib mengimbau semua pihak untuk semua pihak turut serta menciptakan suasana pilkada yang aman,damai dan tertib. Penyelenggara pemilu juga harus berkomitmen kuat untuk bersikap netral dan bukan partisan, dan melembagakan nilai-nilai budaya positif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. *“Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)”*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Amandemen Undang – Undang Pilkada (UU No.10 Tahun 2016), Pasal 22.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Bandle, Robert F. *The Origins Of Peace* (New York: The Free Press, 1973).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar ilmu politik*. Jakarta, PT Gramedia pustaka utama 2008.
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Harrisson, Lisa. *Metode Penelitian Politik*. Jakarta: kencana, 2009.
- Hutapea, Erwin. *“Dua Paslon Pilkada Makassar Ditetapkan, tetapi Tidak Ada Kandidat yang Hadir”*, Kompas.com. 12 Februari 2018.
- Hermawan, Yulias *Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional: Actor, Isu, Dan Metodologi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007) .
- Indrawati, *Peranan Panwaslu Propinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 (studi kasus di propinsi Kalimantan barat)*. Jurnal hukum Mahasiswa S1, Prodi Ilmu Hukum Untan, Vol. 2, No. 1, 2013.
- K, Robert. *Yin Studi Kasus Desain Metode*. Jakarta : Rajawali Press, 1996.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* . Jakarta: Sukses Publishing, 2012.

Meilanti, Novita. *“Peran Bawaslu Propinsi Lampung dalam Menegakkan Peraturan KPU”*. Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Munarto, Andi Ali. *Potensi Konflik Pada Pemilihan Kepala Daerah Lansung Di Kota Makassar Tahun 2013*, (Jurnal Magister Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Vol 1, No. 1, Januari 2015.

Nurmadinah, Andi, *Resolusi Koflik Pasca Pilkada Tahun 2010 Di Kabupaten Gowa*, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012).

Prasetya, Alfin. *Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013*, (Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.

Rahmatunnisa, Mudiyati. *Mengapa Integritas Pemilu Penting?*. Jurnal Bawaslu, ISSN 2443,2539, Vol. 3, No. 1, 2017.

Sumber Data Panwaslu Kota Makassar Tanggal 14 Agustus 2018

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, rajawali pers, 2013.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Suharizal. *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, Dan Konsep Mendatang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

supriyanto, didik penguatan bawaslu optimalisasi posisi, organisasi dan fungsi dalam pemilu 2014, jakarta : direktur eksekutif perludem, 2012).

Syafe'i, *Racmat. Aqidah, Akhlak, Sosial dan Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Wahyudi, *Manajemen Konflik dalam Organisasi Pedoman Praktis Bagi Pemimpin*. Bandung. CV. Alfabeta. 2008.

Internet:

<http://makassarkota.go.id/105-sejarahkotamakassar.html> (Diakses pada 25 agustus 2018)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2019 . [http:// BAB II Gamabaran Umum Kondisi Daerah.pdf](http://BAB%20II%20Gamabaran%20Umum%20Kondisi%20Daerah.pdf) (Diakses pada 25 agustus 2018).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2019 . [http:// BAB II Gamabaran Umum Kondisi Daerah.pdf](http://BAB%20II%20Gamabaran%20Umum%20Kondisi%20Daerah.pdf) (Diakses pada 15 September 2018).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2019 . [http:// BAB II Gamabaran Umum Kondisi Daerah.pdf](http://BAB%20II%20Gamabaran%20Umum%20Kondisi%20Daerah.pdf) (Diakses pada 15 September 2018).

<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu> (Akses 27 September 2018) Jam 17.30

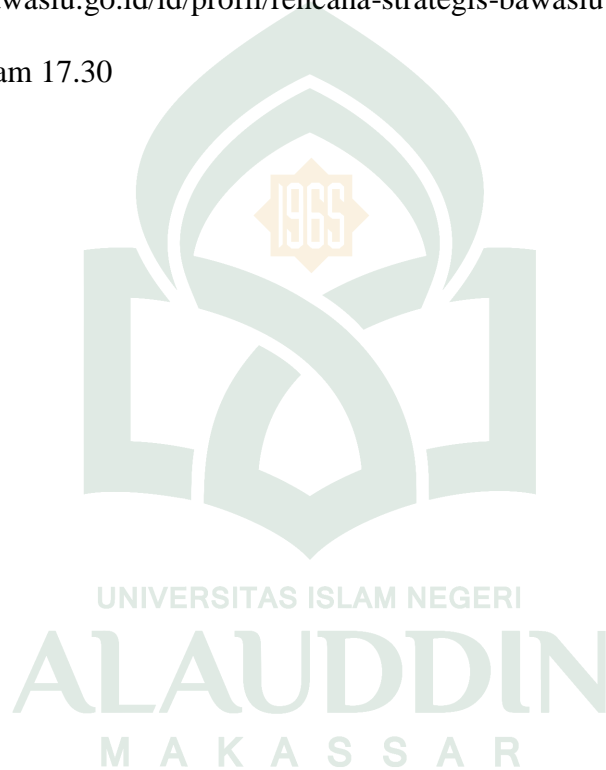
<http://nasional.kompas.com/peran-bawaslu-dan-pemilu-yang-berintegritas>. (Diakses 28 September 2018) Jam 12.00.

<http://makassar.tribunnews.com/2018/03/21/inilah-pasal-penyebab-danny-indira-didiskualifikasi-pt-tun-petahana-ini-juga-pernah-merasakannya>(Diakses 28 September 2018) Jam 19:00

Konflik pilkada <https://kumparan.com/suyito-suyito/konflik-pilkada>(Akses 01 oktober 2018) Jam 17.30

<https://jambi.antaranews.com/berita/322126/masukan-bagi-kpu-mengatasi-konflik-pilkada-2018>(Akses 30 September 2018) Jam 20.30

<http://www.bawaslu.go.id/id/profil/rencana-strategis-bawaslu> (Akses 25agustus 2018) Jam 17.30



L

A

M

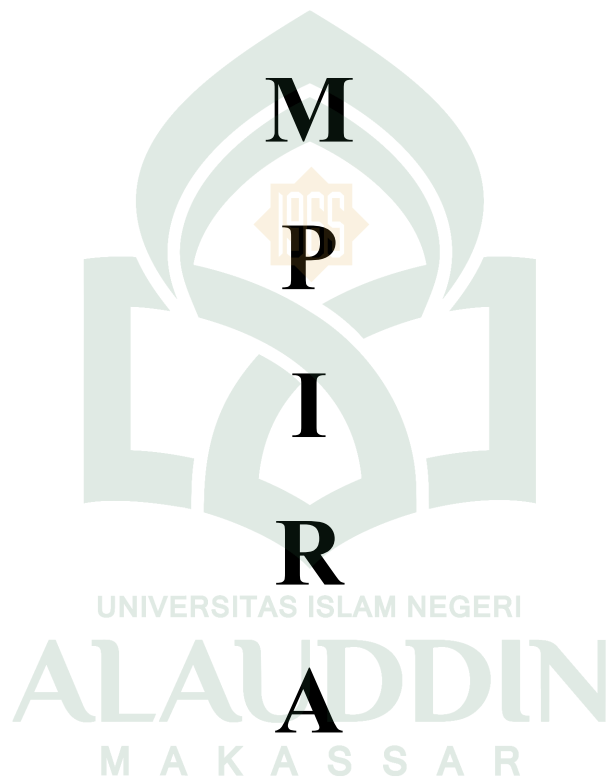
P

I

R

A

N





Gambar.1.1 Tampak depan kantor Panwaslu kota Makassar



Gambar.1.2. Ketua Panwaslu kota Makassar bapak Nursari, S.H, M.H.



Gambar. 1.3. Wawancara bersama dengan Ketua Panwaslu Kota Makassar



Gambar. 1.4. Sidang penyelesaian sengketa PEMILUKADA Kota Makassar



Gambar.1.5. Sosialisasi Panwaslu menjelang pemilukada di kota Makassar



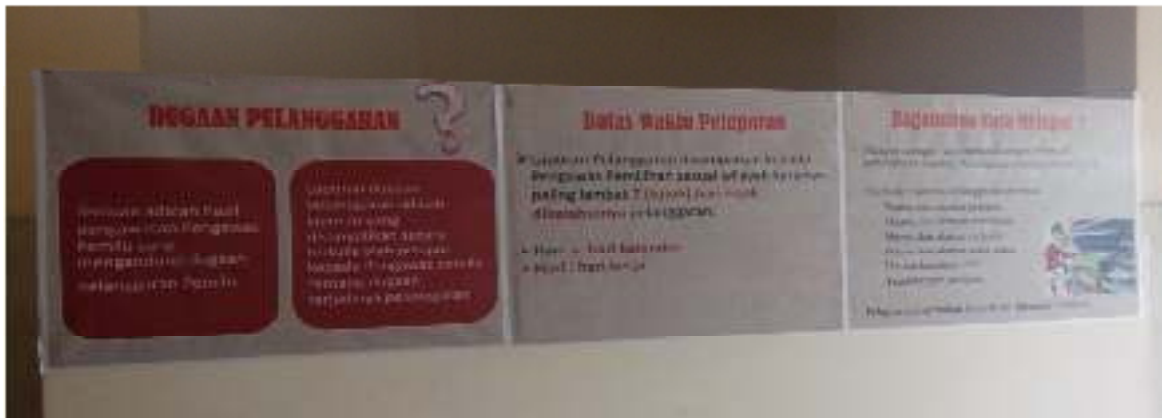
Gambar.1.6. Wawancara selaku ketua Panwaslu Kota Makassar bapak nursari SH, MH



Gambar 1.7. Foto bersama staf anggota Panwaslu Kota Makassar kak ical



Gambar.1.7. Wawancara bersama salah satu anggota Panwaslu kak Ono bagian penindakan sengketa



Gambar. 1.8. foto bersama Inna Muthmainnah, S.Pd.I divisi bagian pengawasan



Gambar.1.9. Wawancara bersama salah satu Tim pemantau anggota Panwaslu Kota Makassar



Gambar.1.10. Pengamanan oleh aparat Kepolisian di kantor Panwaslu di Kota Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



Gambar.1.11. Pengamanan oleh aparat Kepolisian di kantor Panwaslu di Kota Makassar



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AL AUDDIN



Gambar Komisioner Panwaslu Kota Makassar

ANGGOTA PANWASLU KOTA MAKASSAR



Nama : Nursari, S.H, M.H.

Jabatan : Ketua

Divisi : Penindakan & Sengketa



Nama : DR. Abdillah Mustari, MA.

Jabatan : Anggota

Divisi : Kelembagaan dan SDM



Nama : Inna Muthmainnah, S.Pd.I

Jabatan : Anggota

Divisi : Pengawasan

KEPALA SEKRETARIAT



Nama : M. Amsarizal Yunus, S.IP

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

Bawaslu bertugas:

A Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;

B Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:

1. Pelanggaran Pemilu; dan
2. Sengketa proses Pemilu;

c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:

1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:

1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;

3. Penetapan Peserta Pemilu;
 4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;

- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; '
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu berkewajiban:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.



12018191424295

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 4296/S.01/PTSP/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar Nomor : B-127/FUF/PP.00.9/07/2018 tanggal 31 Juli 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini;

Nama : **A. MUH. SETIAWAN P**
Nomor Pokok : 30600113022
Program Studi : Ilmu Politik
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 63 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PERAN BAWASLU DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK PILKADA DI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **08 Agustus s/d 10 Oktober 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM Negeri
ALAUDDIN
Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 03 Agustus 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Portinggal.





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Yeni No 2 Makassar 90111
Telp +62411 - 3615867 Fax +62411 - 3615867
Email : kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 07 Agustus 2018

Kepada

Nomor : 070 / 27⁵² -IV/BKBP/VIII/2018
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. KETUA BAWASLU
KOTA MAKASSAR

Di -

MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 4296S.01/PTSP/2018 Tanggal 03 Agustus 2018, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa:

NAMA : A. MUH. SETIAWAN P
NIM/ Jurusan : 30600113022 / Ilmu Politik
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UIN
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 36, Makassar
Judul : "PERAN BAWASLU DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK
PILKADA DI KOTA MAKASSAR"

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 08 Agustus s/d 10 Oktober 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
Ub. KABID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



DIS. IRIANSJAH R. PAWELLERI, M.AP

Pangkat : Pembina

NIP : 19621110 198603 1 042

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul - Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Muh Setiawan Putra dilahirkan di Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan, Kecamatan Rappocini Jalan Minasaupa Raya pada hari Senin tanggal 31 Juli 1995. Anak Pertama dari dua bersaudara hasil buah kasih dari pasangan A. Munassar dan A. Firdania

Penulis memulai pendidikan dari Sekolah Dasar di SD Negeri Pongtiku 1 Kelurahan Malimongan Baru Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan lulus pada tahun 2007. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 10 Kelurahan Malimongan Baru Kecamatan Bontoala Kota Makassar dan menyelesaikan studinya pada tahun 2010. Setelah lulus dari sekolah menengah pertama, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 16 Makassar dan berhasil menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2013. Setelah lulus sekolah menengah atas penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2013 dan lulus di jurusan ilmu politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik.

Penulis pernah menjadi Sekertaris KARANG TARUNA (Organisasi Kepemudaan) di tingkat Kelurahan pada periode 2015-2017 dan aktif di beberapa Organisasi lainnya seperti HMI, (Himpunan Mahasiswa Islam), GMP (Gerakan Mahasiswa Politik). Penulis menyadari bahwa berorganisasi sangat penting sebab merupakan bagian dari pengembangan wawasan keilmuan seorang mahasiswa. Tidak semua pengetahuan dapat diperoleh melalui bangku kuliah melainkan juga melalui pengalaman berorganisasi. Namun demikian bukan berarti hanya fokus berorganisasi dan melupakan tanggungjawab mahasiswa untuk kuliah. Jadi harus seimbang antara organisasi dan kuliah sehingga benar-benar meningkatkan kualitas dan kapasitas keilmuan kita selaku mahasiswa.

MAKASSAR